

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA**

2025 - 2029



KECAMATAN COBLONG



KECAMATAN
COBLONG **JITU**

JALAN, BUDAYA, BERKUALITAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Coblong selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja yang akan menjadi acuan bagi seluruh perangkat kecamatan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025–2029, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan aspirasi masyarakat Kecamatan Coblong. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintahan, kelurahan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas warga, menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen ini.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Coblong dapat semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, pemikiran, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Coblong, demi mewujudkan Kota Bandung yang UTAMA.

Bandung, 13 November 2025

CAMAT COBLONG



KRINDA HAMIDIPRADJA, S.H., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19680317 199603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR GRAFIK v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH..... 7

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Coblong..... 7

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Coblong..... 7

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Coblong 18

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Coblong..... 21

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 56

2.1.5. Mitra Kecamatan Coblong..... 57

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis..... 59

2.2.1. Permasalahan 59

2.2.2. Isu Strategis 73

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 85

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029..... 85

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029..... 85

3.3. Analisis Lingkungan Strategis (Analisis SWOT) 87

3.4. Strategi Kecamatan Coblong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Coblong tahun 2025-2029 90

3.5. Arah Kebijakan Kecamatan Coblong dalam Mencapai Tujuan dan
Sasaran Renstra Kecamatan Coblong tahun 2025-2029..... 94

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 98

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Coblong Tahun 2025-
2030 98

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan
Coblong..... 117

BAB V PENUTUP 125

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 BATAS WILAYAH KECAMATAN COBLONG 18

TABEL 2.2 PEMBAGIAN WILAYAH KECAMATAN COBLONG 19

TABEL 2.3 DATA KEPENDUDUKAN KECAMATAN COBLONG 19

TABEL 2.4 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN 20

TABEL 2.5 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG
DITAMATKAN 20

TABEL 2.6 CAPAIAN IKU KECAMATAN COBLONG TAHUN 2020-2023 22

TABEL 2.7 CAPAIAN IKU KECAMATAN COBLONG TAHUN 2024 BERDASARKAN RPD
2024-2026 23

TABEL 2. 8 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN COBLONG TAHUN
2020-2024..... 24

TABEL 2.9 RIVIU PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN COBLONG
TAHUN 2020-2024..... 25

TABEL 2.10 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN COBLONG.....26

TABEL 2.11 DATA KEPEGAWAIAN 36

TABEL 2.12 DATA SARANA DAN PRASARANA KANTOR 37

TABEL 2.13 DATA PELAYANAN KEPENDUDUKAN..... 39

TABEL 2.14 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 40

TABEL 2.15 DATA PERMASALAHAN PERSAMPAHAN 43

TABEL 2.16 DATA PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN 44

TABEL 2.17 DATA STUNTING..... 46

TABEL 2.18 SARANA DAN PRASARANA KONDISI RUSAK..... 48

TABEL 2.19 REKAPITULASI DATA SARANA PRASARANA KONDISI RUSAK 49

TABEL 2.20 DATA UMKM 51

TABEL 2.21 DATA KEMISKINAN KECAMATAN COBLONG 52

TABEL 2.22 DATA SATLINMAS DAN SATKAMLING AKTIF 55

TABEL 2.23 MITRA KECAMATAN COBLONG 58

TABEL 2.24 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN COBLONG 80

TABEL 3.1 TUJUAN KECAMATAN COBLONG..... 85

TABEL 3.2 SASARAN KECAMATAN COBLONG..... 86

TABEL 3.3 KETERKAITAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN COBLONG 90

TABEL 3.4 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN
COBLONG 91

TABEL 3.5 PENAHPAN PEMBANGUNAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2030..... 94

TABEL 3.6 PENAHPAN RENSTRA KECAMATAN COBLONG TAHUN 2025-2030 95

TABEL 3.7 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN
COBLONG 95

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA
KECAMATAN COBLONG.....100

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN.....110

TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....116

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN COBLONG KOTA
BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 2025 –
2029 118

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN 8

GAMBAR 2.2 PETA WILAYAH KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG..... 18

GAMBAR 2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN..... 76

GAMBAR 3.1 *LOGIC* MODEL..... 93

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1 DATA PELAYANAN KEPENDUDUKAN 39

GRAFIK 2.2 CAPAIAN NILAI IKM.....40

GRAFIK 2.3 DATA PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI.....43

GRAFIK 2.4 KETAHANAN PANGAN (RW BURUAN SAE).....45

GRAFIK 2.5 PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 47

GRAFIK 2.6 SARANA DAN PRASARANA KONDISI RUSAK.....49

GRAFIK 2.7 UMKM KECAMATAN COBLONG.....51

GRAFIK 2.8 DATA KEMISKINAN KECAMATAN COBLONG.....53

GRAFIK 2.9 GRAFIK SATLINMAS DAN SATKAMLING 55

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu pemerintahan yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak, dalam upaya menindaklanjuti atas amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dimana salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024. Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung mengalami masa transisi, oleh karenanya harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah periode 2025-2029.

Definisi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan Ketentuan Umum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029. Walau

demikian, Sebagai salah satu fungsi dari Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut bersinergi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan tentu harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dalam upaya mewujudkan pelayanan prima untuk disusun pada dokumen perencanaan pembangunan agar kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Coblong tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Coblong pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung tahun 2025-2029. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Coblong, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kota Bandung. Renstra Kecamatan Coblong memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029.

Penyusunan Renstra 2025-2029 Kecamatan Coblong Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2025-2029. Dalam menyusun RENSTRA ini juga selain berpedoman pada RT RW Kota Bandung, juga perlu memperhatikan RT RW kecamatan sekitar, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar Kecamatan serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu

kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 bahwa penyusunan Renstra Kecamatan Coblong

Tahun 2025-2029 melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra ;
2. Tahapan Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;
3. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029;
4. Tahapan Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029;
5. Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025- 2029;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
7. Penetapan Penstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029.

Renstra SKPD Kecamatan Coblong Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga Kinerja Pembangunan Daerah dapat berkesinambungan dan memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025- 2029

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-undang Nomor 104 Tahun 2024 Tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045;
 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029 adalah dasar/acuan Kecamatan Coblong untuk menjalankan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi alat untuk mengukur kinerja penyelenggaraan bidang urusan/unsur Kecamatan Coblong yang mendukung pelaksanaan tahapan pertama perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Bandung.

Tujuan:

1. Pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Coblong mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
2. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang urusan/unsur Kecamatan;
3. Tersusunnya dokumen yang menggambarkan kebermanfaatan Kecamatan Coblong berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sasaran dalam RPJMD Kota Bandung; dan
4. Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis Melalui Pemerintahan yang Berorientasi Melayani Serta Berkelanjutan dalam Mendukung Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Coblong 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN COBLONG
2.1	Gambaran Pelayanan Kecamatan Coblong
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Coblong
2.1.2	Sumber Daya Kecamatan Coblong
2.1.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Coblong
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan
2.1.5	Mitra PD
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis
2.2.1	Permasalahan
2.2.2	Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029
3.2	Sasaran Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029
3.3	Strategi Kecamatan Coblong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Coblong tahun 2025-2029
3.4	Arah Kebijakan Kecamatan Coblong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Coblong tahun 2025-2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029
4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Coblong
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Coblong

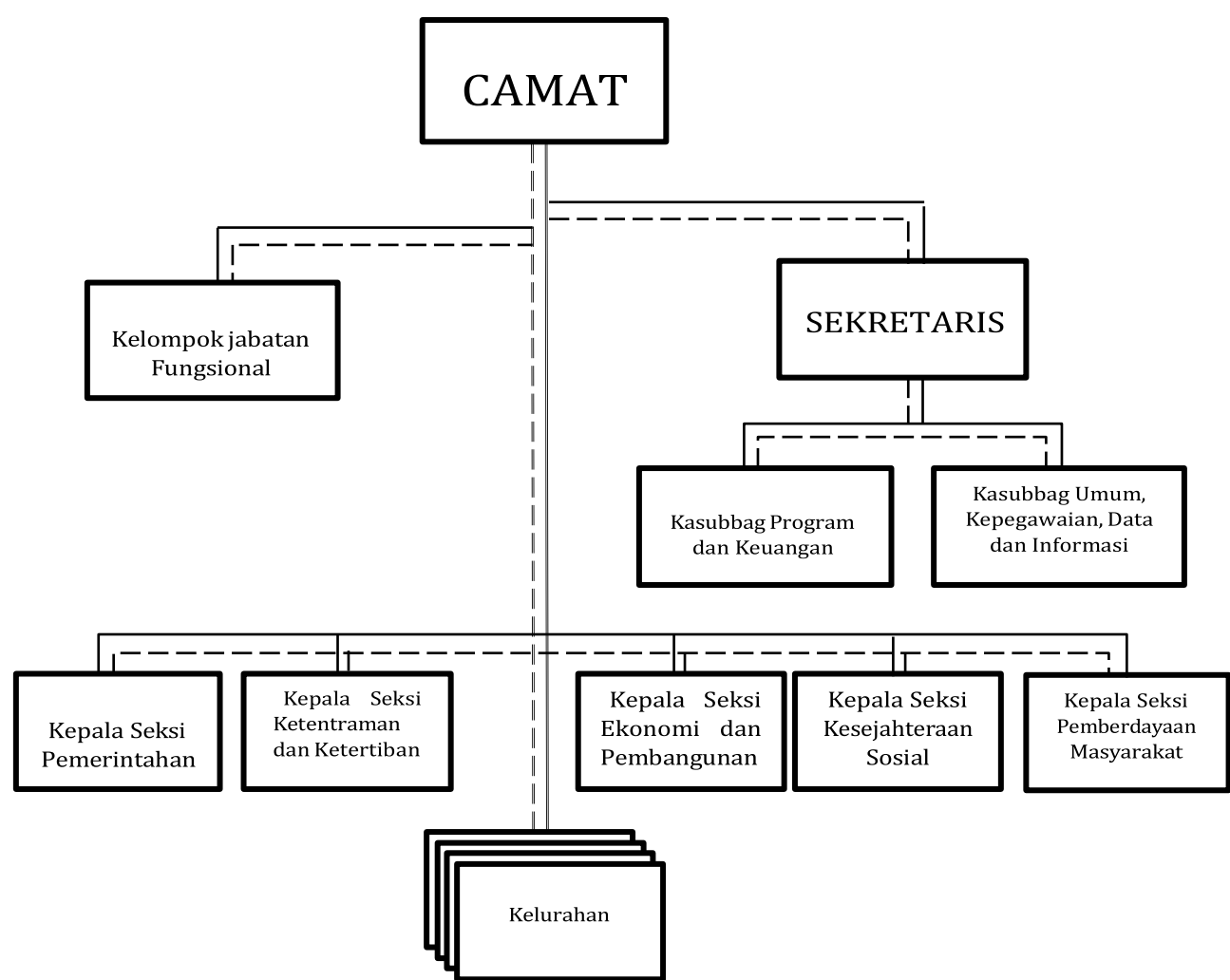
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Coblong

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Bandung, telah dibuat kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Bandung. untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat, ditetapkan juga Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 tentang pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung, susunan organisasaasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan informasi.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Coblong Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. sebagai berikut :

- 1. Camat
 - 1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat untuk menangani sebagian urusanOtonomi Daerah.
 - 2. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:
 - 3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - 4. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja, anggaran dan kinerja Kecamatan berdasarkan Kebijakan Umum Daerah Kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
3. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
4. Mengkoordinasikan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

10. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
11. Mengoordinasikan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
12. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan administrasi pertanahan;
13. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LKPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, Data dan Informasi, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, serta pengoordinasian tugas-tugas seksi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, Data dan Informasi, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, serta pengoordinasian tugas-tugas seksi;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - e. Mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan,

- protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan manajemen kepegawaian lingkup kecamatan;
 - g. Mengoordinasikan penatausahaan BMD;
 - h. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. Mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
 - l. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Kecamatan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian Data dan Informasi

- 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- 2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan lingkup pelayanan administrasi umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
- 3. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;

- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- d. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
- e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- f. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Kecamatan;
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- h. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- i. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Tabungan Perumahan, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Kecamatan;
- m. Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
- n. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan

- pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.
3. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
 - d. Melaksanakan penatausahaan keuangan kecamatan;
 - e. Menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - g. Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
 - h. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Kecamatan;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - j. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana

- kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemerintahan

- 1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- 2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.
- 3. Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan;
 - d. Melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
 - e. Melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - f. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - g. Membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan;
 - h. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 - d. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan fasilitasi pendegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
 - g. membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup Kesejahteraan Sosial.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan

- berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan inventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
 - f. membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- 1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
- 3. Uraian tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - d. melaksanakan fasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. melaksanakan inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pembangunan sara dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - g. melaksanakan fasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;

- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, dan pembangunan dengan instansi terkait;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 3. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;

10. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait;
- b. membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, transmigrasi;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban

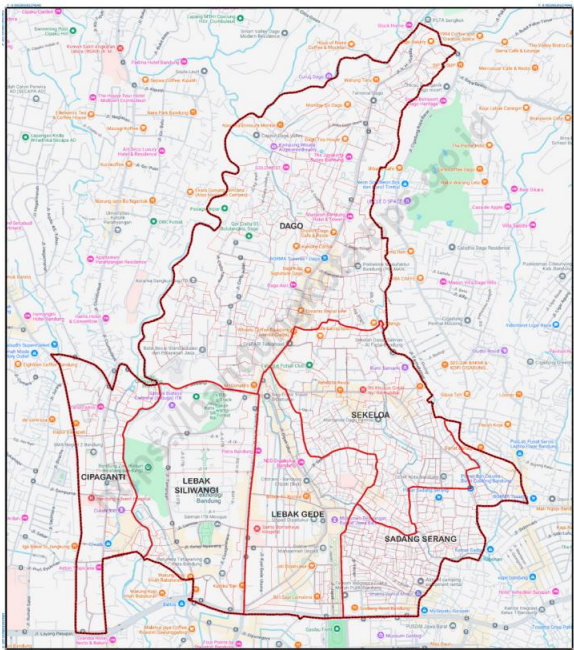
- kepada atasan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.1.2. Sumber Daya Kecamatan Coblong

Kecamatan Coblong merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Batas Wilayah Kecamatan Coblong

Utara	Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan Kecamatan lembang Kabupaten Bandung Barat
Selatan	Kecamatan Bandung Wetan
Barat	Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Cidadap
Timur	Kecamatan Cibeunying Kaler



Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Coblong Kota Bandung

Kecamatan Coblong terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini merupakan salah satu dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung dan dikenal sebagai salah satu daerah yang strategis dan berkembang di kota tersebut. Coblong memiliki beberapa fasilitas pendidikan dan pusat kegiatan masyarakat yang signifikan, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) yang merupakan salah satu universitas ternama di Indonesia. Lokasi Coblong yang dekat dengan pusat kota Bandung membuatnya menjadi

area yang cukup padat penduduk dan memiliki aksesibilitas yang baik.

Luas wilayah Kecamatan Coblong sekitar 743,30 hektar dengan tingkat kepadatan penduduk 15.750 Jiwa/Km². Adapun pembagian wilayah dan data kependudukan di Kecamatan Coblong sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Kecamatan Coblong

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Cipaganti	7	52
2.	Lebak Siliwangi	6	23
3.	Lebakgede	13	64
4.	Sadang Serang	21	130
5.	Sekeloa	16	93
6.	Dago	13	105
Jumlah		76	467

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Coblong Tahun 2025

Tabel 2.3 Data Kependudukan Kecamatan Coblong

NO	KELURAHAN	JML RW	JML RT	JML KK	JUMLAH PENDUDUK		
					Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
1	CIPAGANTI	7	52	2.973	5.317	5.378	10.695
2	LEBAKGEDE	13	64	2.908	7.667	7.906	15.573
3	SADANGSERANG	21	130	9.580	14.503	14.246	28.749
4	DAGO	13	105	8.723	14.176	14.974	29.150
5	SEKELOA	16	93	4.868	13.884	14.726	28.610
6	LEBAK SILIWANGI	6	23	1.169	1.812	1.831	3.643
JUMLAH		76	467	30.221	57.359	59.061	116.420

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Coblong Tahun 2025

Berdasarkan data kependudukan diatas Kecamatan Coblong terdiri dari 6 Kelurahan, 76 RW dan 467 RT, jumlah penduduk mencapai 116.367 Jiwa yang terbagi atas 57.359 laki- laki dan 59.061 perempuan dengan jumlah kepala keluarga

sebanyak 30.221 KK. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat adalah Kelurahan Dago dengan jumlah penduduk 29.150 Jiwa dengan luas wilayah 258 hektar atau sekitar 2,58 Km².

untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Coblong Kota Bandung memiliki sumberdaya manusia (pegawai) dan sarana prasarana kantor sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	URAIAN	ES. 3	ES. 4	Fung sional Umum	PPPK	JUM LAH	(KEBUTUHAN PEGAWAI)
1	Kecamatan Coblong	1	5	8	2	16	42
2	Kelurahan Cipaganti	-	5	-	-	5	11
3	Kelurahan Lebakgede	-	4	2	-	6	11
4	Kelurahan Sadang Serang	-	4	2	-	6	11
5	Kelurahan Dago	-	2	2	-	4	11
6	Kelurahan Sekeloa	-	4	1	-	5	11
7	Kelurahan Lebak Siliwangi	-	3	2	-	5	11
JUMLAH		1	27	17	2	47	108

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Coblong, Bulan September Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Coblong Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 47 orang, sementara berdasarkan analisis beban kerja kebutuhan pegawai sebanyak 108 orang pegawai, artinya baru 43,52% pegawai yang dapat dipenuhi dari total kebutuhan pegawai di Kecamatan Coblong. Yang terdiri dari pegawai eselon III sebanyak 1 orang yaitu Camat Kecamatan Coblong, Eselon IV sebanyak 27 orang. Fungsional Umum sebanyak 17 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Sub Bagian Umum Kepegawaian, Data dan Informasi dan PPPK sebanyak 2 Orang di Kecamatan Coblong. Serta rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja.

Serta kualifikasi Pendidikan di lingkungan Kecamatan Coblong, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 5 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	Jml
1	Kecamatan Coblong	-	4	8	2	2	16
2	Kelurahan Cipaganti	-	1	4	-	-	5
3	Kelurahan Lebakgede	-	1	4	1	-	6
4	Kelurahan Sadang Serang	-	2	3	-	1	6
5	Kelurahan Dago	-	2	1	-	1	5
6	Kelurahan Sekeloa	-	1	4	-	-	5

7	Kelurahan Lebak Siliwangi	-	2	2		1	5
	JUMLAH		13	26	3	6	47

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Coblong, Bulan Juni Tahun 2025

Kondisi kekosongan pegawai ini berisiko pada menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan public. yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Coblong kepada masyarakat.

Serta sarana dan prasarana pendukung seperti bangunan Gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan, peralatan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang masih belum cukup memadai meningkatkan kualitas pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kecamatan Coblong.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Coblong

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat. Dengan begitu Kecamatan Coblong dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha.
2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan
3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti pemeliharaan jalan lingkungan, buruan sae, peningkatan ODF, fasilitasi pengelolaan sampah,dll.
4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Satgaslinmas, Satkamling Aktif dan Satlinmas Aktif

5. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
6. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Coblong Kota Bandung selama 5 (lima) Tahun ke belakang terbagi menjadi 2 (dasar) perhitungan kinerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018- 2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024- 2026. Berikut adalah pencapaian Indilator Kinerja Utama Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang berdasarkan pada RPJMD Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Capaian IKU Kecamatan Coblong Tahun 2020-2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Tar get	Realisasi	Tar Get	Realisasi	Tar get	Realisasi	Tar get	Realisasi
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Coblong	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	92.04	92.58	91.97	91.97	93.71	93.71	95.46	95.46
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Coblong	Persentase Siskamling RW Aktif	%	n/a	n/a	65	100	65	100	65	65
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Coblong	Persentase Kelurahan Unggul	%	66.67	66.67	69.57	69.57	70.97	70.97	72.37	72.37
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Coblong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong	Nilai	84.92	87.89	84.95	96.37	84.97	93.21	87	87.06

Pada tahun 2024, Kecamatan Coblong telah melaksanakan 4 program dan 15 kegiatan yang terdiri dari 3 program utama yang didukung oleh 7 kegiatan dan 1 program penunjang yang meliputi 8 kegiatan, dengan alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 34.704.757.933,00 dan realisasi sebesar Rp 32.386.134.915,00 atau 93,32 %. Berikut pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Coblong Tahun 2024 yang berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.7 Capaian IKU Kecamatan Coblong Tahun 2024 Berdasarkan RPD 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kerja	Satuan	2024			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Coblong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Coblong	Nilai	87.27	97.42	111.63	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Coblong	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	100	
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan Coblong	Persentase Kelurahan Berdaya	%	95.7	95.7	100	
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Coblong	Persentase Satlinmas Aktif	%	70	70	100.	

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun, Kecamatan Coblong Kota Bandung telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Coblong Kota Bandung telah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Namun tentu saja dalam pencapaian tersebut masih terdapat ruang-ruang yang diperlukan untuk perbaikan, karena kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan demi tercapainya kepuasan Masyarakat, meningkatnya kepercayaan Masyarakat, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, juga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan..

Adapun capaian indikator kinerja Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam kurun waktu 2020-2024 terdapat 5 sasaran dimana dalam setiap tahunnya memungkinkan untuk terjadi perubahan sasaran sesuai dengan bagaimana hasil reuiu Renstra pada tahun tersebut, sasaran pada capaian kinerja Kecamatan Coblong Kota Bandung digambarkan dalam beberapa indikator, dapat dilihat lebih rinci pada uraian berikut:

Tabel 2.8 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Coblong Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Persentase Capaian pada tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong	Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	84.92	-	-	-	-	87.89	-	-	-	-	103.50	-	-	-	-
	Persentase Kelurahan Unggul	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	66.67	69,57	70.97	72.37	100	66.67	69,57	70.97	72.37	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	92.04	-	-	-	-	92.58	-	-	-	-	100.59	-	-	-	-
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong	Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	-	84,95	87.97	87	87.27	-	96,37	93.21	87.06	97.42	--	113.44	109.70	100.07	111.63
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	-	91,97	93.71	95.46	-	-	91,97	93.71	95.46	-	-	100	100	100	-
	Persentase Siskamling RW aktif	Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	-	65	65	65	-	-	100	100	65	-	-	153.85	153.85	100	-
	Persentase Kelurahan Berdaya	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	-	-	-	-	95.7	-	-	-	-	95.7	-	-	-	-	100
	Persentase Satlinmas Aktif	Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100

Tabel 2.9 Rivi u Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Coblong Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Tahun 2020-2024												
Sasaran Strategis RJMD	Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020-2024					Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Coblong				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yg melayani, efektif, efisien dan bersih	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	84.92	84,95	87.97	87	87.27	87.89	96,37	93.21	87.06	97.42
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yg melayani, efektif, efisien dan bersih	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Coblong	Persentase Kelurahan Unggul	66.67	69,57	70.97	72.37	100	66.67	69,57	70.97	72.37	100
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Coblong	Persentase Kelurahan Berdaya	n/a	n/a	n/a	n/a	95.7	n/a	n/a	n/a	n/a	95.7
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	65	65	65	70	n/a	100	100	65	70

Tabel 2.10 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Coblong Kota Bandung

URAIAN	ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	7.922.303.396	13.553.733.127	17.655.824.831	22.218.690.353	19.065.942.239	7.374.060.017	12.558.863.286	16.594.228.504	18.143.858.394	17.225.116.620	93,08%	92,66%	93,99%	81,66%	90,34%	17,77	17,33
Persentase Kelurahan Unggul	3.213.055.450	9.702.390.049	6.169.990.757	6.148.791.676	6.945.696.518	2.997.717.265	9.523.023.550	6.125.788.748	6.083.857.633	6.734.673.731	93,30%	98,15%	99,28%	98,94%	96,96%		
Persentase Kelurahan Berdaya	6.519.518.838	4.211.518.418	9.676.338.139	12.240.037.794	7.126.543.649	6.333.831.750	3.973.266.020	9.518.613.552	12.092.795.115	6.891.710.684	97,15%	94,34%	98,37%	98,80%	96,70%		
Persentase Siskamling RW Aktif	383.000.000	410.700.000	427.780.440	541.068.350	1.566.575.527	383.000.000	410.564.750	426.526.000	534.448.540	1.534.633.880	100,00%	99,97%	99,71%	98,78%	97,96%		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra capaian kinerja di Kecamatan Coblong pada umumnya rasio pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tercapai dengan baik atau melebihi target yang ditetapkan. Adapun penyerapan pada akhir tahun RENSTRA pada tahun anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Analisis efisiensi “Persentase Kelurahan Berdaya”.

➤ Rencana :

Input dana yang direncanakan, sebesar Rp. 7.126.543.649 Output yang direncanakan, yaitu dengan Indikator yang ditetapkan maka Kelurahan berdaya adalah kelurahan yang melaksanakan minimal 95.7% dari kegiatan kegiatan berikut:

Terdapat 11 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kelurahan dengan kriteria

1. pengelolaan kegiatan pendukung ODF 100%
2. pengelolaan kegiatan penanganan stunting
3. Kangpisman/ pengelolaan sampah RW
4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa
5. Buruan sae/Urban Farming
6. RW bebas genangan
7. Pembangunan/Pemeliharaan
8. Sarana Prasarana permukiman lainnya.
9. Pembinaan posyandu aktif
10. Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat
11. Fasilitasi Kegiatan LKK

➤ Realisasi.

1. Input dana yang direalisasikan, sebesar Rp 6.891.710.684.
2. Output yang direalisasikan, yaitu:

Realisasi capaian kinerja 95.70% dari target sebesar 95.70% berarti sebanyak 6 (satu) Kelurahan dari 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Coblong memenuhi kriteria berdaya yang ditetapkan oleh Kecamatan.

➤ Analisis Pencapaian.

Persentase pencapaian anggaran adalah sebesar 96.70% sedangkan output kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Coblong disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung :

1. Perencanaan sudah sebagian terpilah dalam sub kegiatan
2. Anggaran dan Swadaya murni masyarakat
3. Peran aktif masyarakat Kecamatan Coblong

Faktor Penghambat

1. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Coblong
2. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian
3. Sebagian ASN tidak paham akan indikator kinerja masing-masing;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan di Kecamatan Coblong. berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas. maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan pemahaman bersama terkait kriteria dan pemahaman istilah yang terkait dengan perencanaan
2. Dapat lebih mengarahkan kembali kepada pejabat struktural baik di kecamatan maupun dikelurahan dalam membuat perencanaan anggaran yang dapat mendukung pencapaian IKI dan mendukung tercapainya RPJMD;

2. Analisis efisiensi “Presentase Satlinmas Aktif”

➤ **Rencana :**

Input dana yang direncanakan, sebesar Rp. 1.566.575.527 Output yang direncanakan, yaitu:

Target sebesar 70% dari 6 Kelurahan memenuhi Kriteria Satlinmas Aktif Aktif. Kriteria Satlinmas Aktif adalah secara kumulatif.

memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas;
2. Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas;
3. Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas;
4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas;
5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas;
6. Laporan Tahunan Satlinmas;
7. Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria:

- Kepengurusan/Kelembagaan
- Jadwal piket/ronda
- Daftar Hadir
- Buku Laporan

➤ **Realisasi.**

Input dana yang direalisasikan, sebesar Rp. 1.534.633.880 Output yang direalisasikan, yaitu: Presentase Satlinmas Aktif di Kecamatan Coblong pada Akhir Tahun 2024 mencapai 70% (sebanyak 4 Kelurahan di Kecamatan Coblong termasuk kriteria Satlinmas Aktif). Pencapaian ini melebihi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 70% sehingga Capaian Kinerja Nyata sebesar 117.14%

➤ **Analisis Pencapaian.**

Persentase pencapaian anggaran adalah sebesar 97,96% sedangkan output kinerja sebesar 117.14%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Coblong** disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung :

1. Adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya pembinaan dari aparat kelurahan dan kecamatan terhadap siskamling yang ada di RW;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Coblong**. berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas. maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan pemahaman bersama terkait kriteria dan pemahaman istilah yang terkait dengan perencanaan
2. Meningkatkan pembinaan terhadap petugas kamling yang ada di lingkungan RW;

3. Analisis efisiensi “Presentase Kelurahan Unggul”

➤ **Rencana :**

1. Input dana yang direncanakan, sebesar Rp. 6.945.696.518 Output yang direncanakan, yaitu: Target sebesar 100% Kelurahan se kecamatan Coblong

memenuhi Kriteria Kelurahan Unggul. Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi 4 (empat) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi semua kriteria. Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah:

1. Laporan RT dan RW lengkap (Kasi Pem) Berdasarkan Perwal 215 Tahun 2018 Terdapat 6 (enam) Dokumen yang harus dipenuhi:
 - A.1 s/d A.5: Laporan Kependudukan
 - Data Laporan Keuangan RW (Pengeluaran dan Penerimaan) sebagai bentuk administrasi pelaksanaan kegiatan Rt dan RW (honorarium kegiatan RT dan RW)
2. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) dengan kriteria:
 - Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan
 - Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan
 - Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan
 - Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas
 - Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering
 - Melakukan penyiraman pada musim kemarau.
2. Pemetaan DTKS (Kesos)
3. Fasilitasi pengembangan UMKM yang mempunyai NIB (Kasi Ekbang)

➤ **Realisasi.**

Input dana yang direalisasikan, sebesar Rp. 6.734.673.731 Output yang direalisasikan, yaitu:

Presentase Kelurahan Unggul di Kecamatan Coblong pada Akhir Tahun 2024 mencapai 100% (sebanyak 6 dari 6 kelurahan di Kecamatan Coblong termasuk kriteria unggul)

➤ **Analisis Pencapaian**

Persentase pencapaian anggaran adalah sebesar 96.96% sedangkan output kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator persentase kelurahan unggul

disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA tahun berjalan.
2. Respon Masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurahan dan kecamatan di tanggap dengan cukup baik.

Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya pemahaman rancangan indikator kelurahan unggul
2. Masih kurangnya sinergitas antar kasi kelurahan dan kecamatan.

Solusi

1. Melakukan sosialisasi rancangan pembentukan kelurahan unggul kepada pejabat struktural kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam mendukung tercapainya kriteria kelurahan unggul di kecamatan Coblong terutama dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung program RPJMD.

4. Analisis efisiensi “Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong”

➤ **Rencana.**

1. Input dana yang direncanakan, sebesar Rp. 34.704.757.933
2. Output yang direncanakan, yaitu: Target sebesar 87,00 Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 6 Kelurahan se Kecamatan Coblong.

➤ **Realisasi.**

1. Input dana yang direalisasikan, sebesar Rp 32.386.134.915
2. Output yang direalisasikan, yaitu :

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Sekretariat Kecamatan Coblong penilaian mandiri oleh Tim yang dilakukan tiap triwulan pada tahun 2024. Capaian Rata Rata IKM Triwulan 6 Kelurahan se-Kecamatan Coblong adalah sebesar 97.42 dengan demikian target nilai IKM Triwulan 4 sebesar 87,25 telah dapat dipenuhi bahkan melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 111,66% Persentase pencapaian anggaran adalah sebesar 93.32 % sedangkan capaian output kinerja sebesar 111.66 %. Berikut ini Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Antaoani periode Tahun Anggaran 2020-2024 tahun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2020	18.037.877.684	17.088.609.032	94,74%
2021	27.878.341.594	26.465.717.606	94,93%
2022	33.929.934.167	32.665.156.804	96,27%
2023	41.148.588.173	36.854.959.682	89,57%
2024	34.704.757.933	32.386.134.915	93,32%

Faktor pendukung :

1. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat
2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Coblong
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Coblong

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah
2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat
3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Coblong

2.1.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Kecamatan Coblong Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2020-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Berdasarkan tabel di atas untuk tahun 2024, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong dengan capaian kinerja 111.63%.

2.1.3.2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Persentase Kelurahan Berdaya (Kecamatan Coblong) dengan capaian kinerja 100%, indikator Persentase Kelurahan Unggul (Kecamatan Coblong) dengan capaian kinerja 100% dan Indikator Persentase Satlinmas Aktif dengan capaian kinerja 100%.Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Secara umum Kecamatan Coblong Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam untuk tahun 2020-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2020-2024 sebanyak 4 sasaran. Tahun 2024 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Coblong, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Berdasarkan tabel 2.6 diatas harus dievaluasi yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja perlu dilakukan juga analisis dengan pembandingan-pembandingan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- 2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- 3. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- 4. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- 5. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4

indikator kinerja yang terdiri dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024 di Kecamatan Coblong Kota Bandung, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Capaian kinerja nyata indikator "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong" adalah sebesar 97.42 dari target sebesar 87.25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 111.63 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 5, capaian kinerja indikator 4 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong" tahun ini adalah sebesar 111.63 %.

Capaian kinerja nyata indikator "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong" adalah sebesar 97.42 dari target sebesar 87.25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 111.63 %, capaian ini memenuhi target yang diperjanjikan pada Tahun 2024.

2. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Coblong

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Coblong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Coblong" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun ke 5 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 5, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Coblong" tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Coblong maka capaian kinerjanya mencapai 100.00%.

3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Coblong

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Coblong dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Coblong" adalah sebesar 97.50% dari target sebesar 95.7% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.88%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 5, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Cobl原因" tahun ini adalah sebesar 101.88%.

4. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cobl原因

Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cobl原因 dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Persentase satlinmas aktif Kecamatan Cobl原因" adalah sebesar 82 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 117.14%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Dalam menunjang tercapainya capaian tujuan Kecamatan Cobl原因 terdapat 4 bidang urusan yang saling berkaitan dan harus dipenuhi dalam kurun waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Kesekretariatan

Bidang urusan kesekretariatan di Kecamatan Cobl原因 berfungsi sebagai pusat pengelolaan administrasi pemerintahan, tata usaha, serta pelayanan internal organisasi. Kinerja pada bidang ini tercermin melalui pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penyusunan laporan, hingga penyediaan data dan informasi yang akurat untuk mendukung proses pengambilan kebijakan. Selain itu, kesekretariatan juga menjalankan fungsi pengelolaan kepegawaian, keuangan, serta penyediaan sarana prasarana penunjang kerja aparatur kecamatan, sehingga keberlangsungan pelayanan publik dapat berjalan dengan tertib, efisien, dan akuntabel.

Lebih lanjut, bidang kesekretariatan memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi dan komunikasi antar-unit kerja di lingkungan kecamatan. Melalui penerapan sistem administrasi yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi, kesekretariatan berkontribusi dalam mempercepat proses pelayanan internal maupun eksternal. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di tingkat kecamatan, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja kesekretariatan Kecamatan Cobl原因

tidak hanya terbatas pada pengelolaan administrasi rutin, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta sistem kerja yang tertata, kesekretariatan berperan sebagai penggerak utama dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan Coblong. Adapun data kepegawaian serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11 Data Kepegawaian

NO	URAIAN	ASN Struktural	Fung sional Umum	PPPK	NON ASN	JUM LAH	(KEBUTUHAN PEGAWAI)
1	Kecamatan Coblong	6	8	2	11	27	42
2	Kelurahan Cipaganti	5	-	-	4	9	11
3	Kelurahan Lebakgede	4	2	-	4	10	11
4	Kelurahan Sadang Serang	4	2	-	5	11	11
5	Kelurahan Dago	2	2	-	4	8	11
6	Kelurahan Sekeloa	4	1	-	4	9	11
7	Kelurahan Lebak Siliwangi	3	2		3	8	11
JUMLAH		28	17	2	36	82	108

Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Coblong per Agustus 2025

Tabel tersebut menggambarkan kondisi kepegawaian di Kecamatan Coblong beserta kelurahan yang ada di wilayahnya per Agustus 2025. Secara keseluruhan, jumlah pegawai yang ada terdiri dari 47 orang ASN 28 Orang Struktural, 17 orang Fungsional Umum, 2 orang PPPK, serta 36 orang Non ASN. Dengan demikian, total pegawai yang bertugas di Kecamatan Coblong berjumlah 82 orang, sementara kebutuhan ideal pegawai diproyeksikan sebanyak 108 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pegawai sebesar 26 orang untuk mencapai jumlah formasi yang ideal.

Tabel 2.12 Data Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan Pemanfaatan
1	Gedung Bangunan	1	Baik, perlu perluasan lahan parkir	Digunakan sebagai kantor Kecamatan Coblong.
2	Ruang Kerja ASN	27	Baik	Digunakan sebagai ruang kerja pejabat struktural dan staf administrasi.
3	Ruang Rapat	3	Cukup	Dimanfaatkan untuk rapat internal, koordinasi lintas perangkat daerah, dan kegiatan sosialisasi.
4	Komputer/Laptop	25	Sebagian Baik, sebagian perlu peremajaan	Digunakan untuk menunjang pekerjaan administrasi, pelayanan publik, serta pengolahan data.
5	Mesin Printer/Scanner	18	Cukup	Dipakai dalam pengolahan dokumen, surat-menyurat, serta pelayanan administrasi masyarakat.
6	Jaringan Internet	1 paket	Cukup	Menunjang akses data dan aplikasi layanan pemerintahan, namun masih sering mengalami gangguan.
7	Meja dan Kursi Kerja	27 set	Baik	Digunakan sebagai fasilitas utama pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
8	Arsip dan Lemari Penyimpanan	30	Cukup	Digunakan untuk menyimpan dokumen penting, namun keterbatasan kapasitas masih menjadi kendala.
9	Kendaraan Dinas Operasional	61	Cukup	Digunakan untuk mendukung mobilitas kegiatan dinas, terutama koordinasi ke kelurahan.

Sumber Data : Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Coblong 2025

Ketersediaan sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Coblong secara umum sudah dapat menunjang pelaksanaan kegiatan kesekretariatan. Keberadaan ruang kerja, ruang rapat, serta perangkat kerja seperti komputer dan printer, menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran proses administrasi, penyusunan laporan, hingga koordinasi internal maupun eksternal. Namun demikian, sebagian fasilitas masih memerlukan perbaikan atau peremajaan, khususnya perangkat teknologi informasi dan jaringan internet yang belum optimal sehingga dapat menghambat efektivitas kerja pegawai.

Selain itu, sarana penyimpanan dokumen seperti lemari arsip masih terbatas sehingga menimbulkan kendala dalam pengelolaan administrasi jangka panjang. Kendaraan dinas juga perlu perhatian lebih untuk memastikan kesiapan mobilitas pelayanan dan koordinasi dengan kelurahan di wilayah Kecamatan Coblong. Dengan demikian, meskipun

sarana dan prasarana yang tersedia relatif memadai, peningkatan kualitas dan kuantitas masih diperlukan guna mendukung terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Bidang Urusan Pemerintahan

Kinerja bidang urusan pemerintahan di Kecamatan Coblong dilaksanakan melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembinaan kelembagaan masyarakat, serta fasilitasi koordinasi pembangunan di tingkat kelurahan. Fokus utama bidang ini adalah memastikan terselenggaranya tertib administrasi kependudukan, pelayanan publik yang efektif, serta penguatan mekanisme perencanaan dan pengawasan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

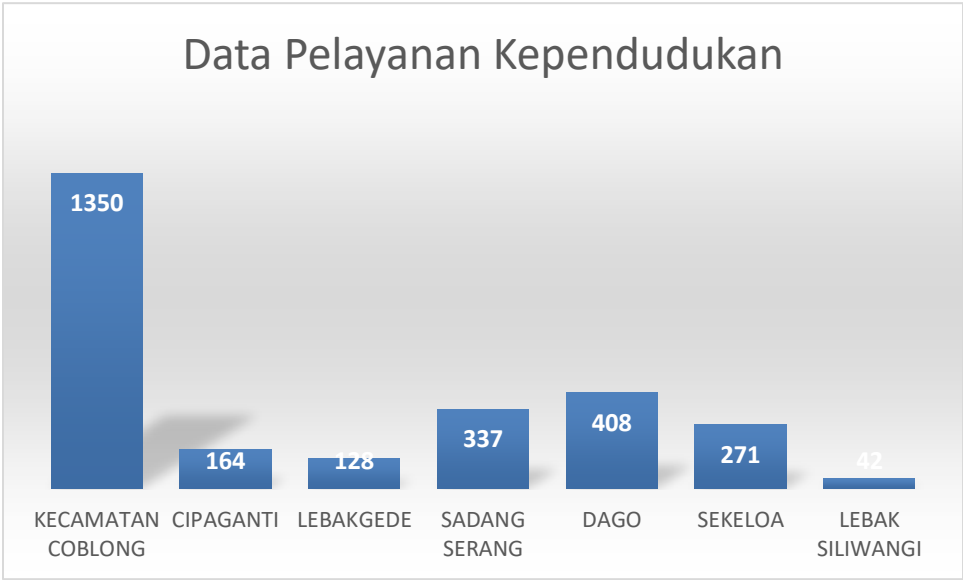
Selanjutnya, kinerja bidang pemerintahan juga ditunjukkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, serta layanan berbasis teknologi informasi yang mempercepat proses pelayanan dan memperluas aksesibilitas masyarakat. Dalam konteks wilayah Kecamatan Coblong yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, pelayanan pemerintahan dituntut untuk responsif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu menjaga ketertiban dan stabilitas sosial di lingkungan kewilayahan.

Selain aspek pelayanan, kinerja urusan pemerintahan juga mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kelurahan, termasuk koordinasi dengan perangkat daerah serta lembaga kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi pembangunan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Coblong. Adapun data pelayanan administrasi kependudukan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13
DATA PELAYANAN KEPENDUDUKAN
KECAMATAN COBLONG
TAHUN 2024

UNIT PELAYANAN	KTP	KK	PINDAH		LEGALISIR	SUKET AHLI WARIS	TOTAL PELAYANAN
			DATANG	KELUAR			
KECAMATAN COBLONG	797	386	87	34	26	20	1350
CIPAGANTI	99	47	7	5	5	1	164
LEBAKGEDE	66	40	9	4	5	4	128
SADANG SERANG	201	98	21	5	10	2	337
DAGO	239	122	28	7	4	8	408
SEKELOA	165	69	21	10	2	4	271
LEBAK SILIWANGI	27	10	1	3	0	1	42
TOTAL PELAYANAN	1594	772	174	68	52	40	2700

Grafik 2.1 Data Pelayanan Kependudukan



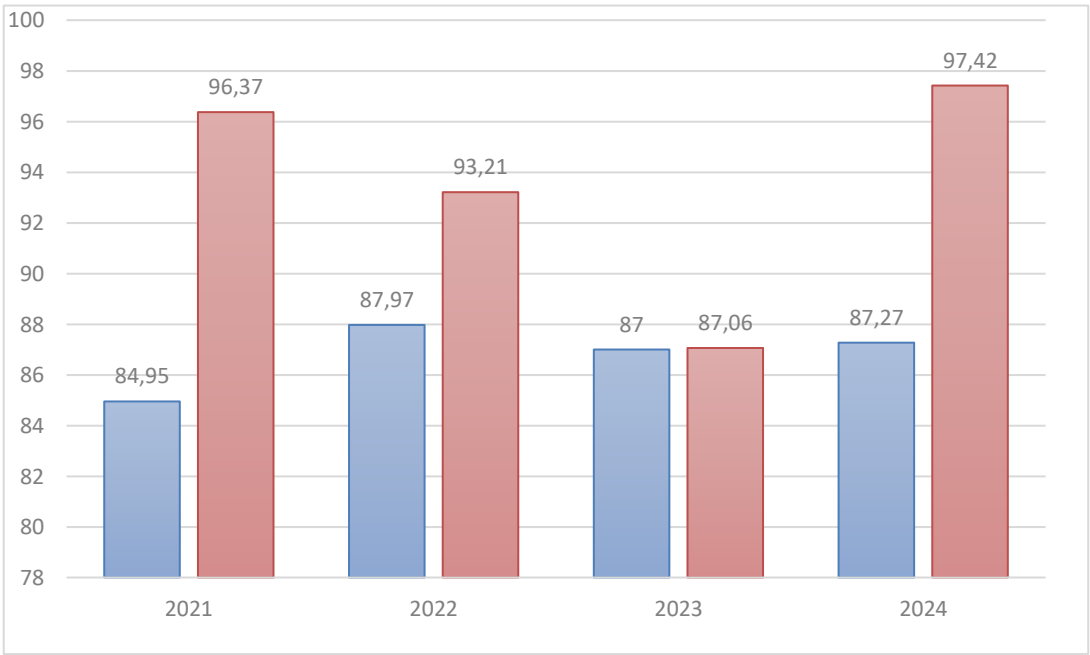
Berdasarkan Tabel diatas mengenai Data Pelayanan Kependudukan Kecamatan Coblong Tahun 2024, terlihat bahwa total pelayanan yang diberikan mencapai **27.000 layanan** dengan rincian terbesar berasal dari pelayanan di tingkat Kecamatan Coblong sebanyak **1.350 layanan**, kebijakan Disdukcapil yang memperbolehkan masyarakat dapat mengurus langsung administrasi kependudukan ke tingkat Kecamatan atau langsung ke Kantor Dukcapil tanpa harus melampirkan register pengajuan dari Kelurahan sehingga konsentrasi pelayanan lebih banyak ditangani langsung di tingkat kecamatan. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penerbitan KTP, Kartu Keluarga (KK), surat pindah datang dan pindah keluar, legalisir dokumen, serta penerbitan surat keterangan ahli waris.

Adapun tabel survei nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Coblong selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong			
TAHUN	Target	Realisasi	Persentasi Capaian
2020	84.92	87.89	103,50%
2021	84,95	96,37	113,44%
2022	87.97	93.21	105,96%
2023	87	87.06	100,07%
2024	87.27	97.42	111,63%

Grafik 2.2 Capaian Nilai IKM



Berdasarkan data Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong periode tahun 2020 sampai dengan 2024, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan publik secara konsisten mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 hingga 2023, realisasi nilai IKM tercatat stabil pada rentang 85,84 hingga 85,87 dengan persentase capaian sebesar 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan berada pada kategori sangat baik serta menunjukkan konsistensi kinerja aparatur dalam mempertahankan standar pelayanan.

Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan, di mana target nilai IKM sebesar 88,00 dapat terlampaui dengan realisasi mencapai 88,30 atau setara dengan 100,34% dari target. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dan penguatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Namun demikian, meskipun nilai IKM menunjukkan tren positif, masih terdapat kendala pada aspek sarana dan prasarana penunjang yang dinilai belum sepenuhnya memadai untuk mendukung optimalisasi pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas infrastruktur pelayanan agar kualitas layanan publik di Kecamatan Coblong dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Bidang Urusan Pemberdayaan

Kinerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Coblong diarahkan pada peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Fokus utama diarahkan pada penguatan kelembagaan masyarakat seperti LPM, TP. PKK, Karang Taruna, serta RT dan RW agar mampu berperan optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan di tingkat kewilayahan. Melalui program pembinaan dan fasilitasi, masyarakat didorong untuk lebih berdaya, mandiri, serta berkontribusi aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan melalui dukungan terhadap pengembangan UMKM, pengolahan sampah mandiri, peningkatan ketahanan pangan, penyediaan infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan dan percepatan pencegahan stunting di

kewilayahan, serta pelatihan keterampilan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis potensi wilayah. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan taraf hidup, serta menciptakan kemandirian masyarakat. Sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Coblong. Adapun data mikro aspek pemberdayaan masyarakat yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah Mandiri (RW KBS)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga adalah kegiatan mengolah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.1439-DLH/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Sampah Terpadu di Wilayah Kota Bandung menyebutkan bahwa bahwa pengurangan dan pengolahan sampah dari sumber timbunan khususnya sampah organik belum berjalan secara optimal dikarenakan faktor penyebab utama adalah belum masifnya pemilahan sampah, sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih dekat ke sumber timbunan yaitu penguatan kewilayahan dan aktifitas klaster, agar kinerja pengolahan dan pemanfaatan sampah khususnya organik dapat ditingkatkan dan berkelanjutan.

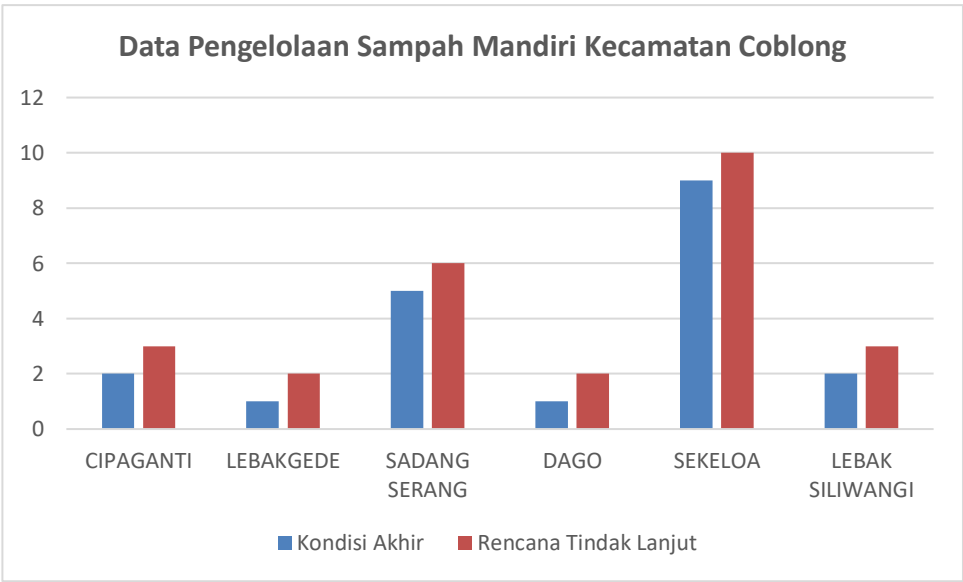
Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dimulai dari pemilahan sampah yang dilakukan di lingkup terkecil yaitu rumah tangga. Pemilahan sampah organik dan anorganik adalah proses memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup (organik) dan sampah yang bukan dari makhluk hidup (anorganik) untuk memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, seperti pengolahan

menjadi pupuk kompos atau daur ulang. Berikut adalah data jumlah kepala keluarga yang telah melakukan pemilahan sampah di Kecamatan Coblong:

Tabel 2.15 Data Permasalahan Persampahan

UNIT KERJA	KONDISI AKHIR 2024					RENCANA TINDAK LANJUT 2025		
	RW	RT	Jumlah KK	Jumlah Rumah Memilah/ Mengolah Sampah	Jumlah RW KBS	Jumlah Rumah Memilah/ Mengolah Sampah	Jumlah RW KBS	Peningkatan RW KBS
CIPAGANTI	7	52	2.973	1	2	2	3	3
LEBAKGEDE	13	64	2.908	2	1	3	2	2
SADANG SERANG	21	130	9.580	6	5	7	6	6
DAGO	13	105	8.723	9	1	10	2	2
SEKELOA	16	93	4.868	6	9	7	10	10
LEBAK SILIWANGI	6	23	1.169	8	2	9	3	3
TOTAL	76	467	30.221	32	20	36	26	26

Grafik 2.3 Data Pengelolaan Sampah Mandiri



Bersasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat akhir permasalahan persampahan di Kecamatan Coblong pada tahun 2024 serta rencana tindak lanjut untuk tahun 2025. Berdasarkan data, jumlah KK yang ada di 6 (enam) kelurahan tercatat sebanyak 30.221 KK, dengan 32 unit di antaranya telah melakukan kegiatan pemilahan atau pengolahan sampah. Selain itu, terdapat 20 RW yang sudah berstatus sebagai Kawasan Bebas Sampah (KBS). Namun demikian, angka tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang ada di wilayah Kecamatan Coblong.

Sebagai tindak lanjut pada tahun 2025, Kecamatan Coblong menargetkan peningkatan jumlah rumah tangga yang melakukan pemilahan atau pengolahan sampah menjadi 36 unit, serta peningkatan jumlah RW Kawasan Bebas Sampah menjadi 26 RW. Peningkatan ini diharapkan dapat mencapai rata-rata 25% dibandingkan kondisi tahun sebelumnya, dengan variasi capaian antar kelurahan. Misalnya, Kelurahan Sekeloa ditargetkan mampu meningkatkan RW KBS hingga 75%, sementara kelurahan lain seperti Lebakgede hanya mencapai peningkatan 12,5%. Hal ini menunjukkan adanya upaya terstruktur dan bertahap dalam mengatasi permasalahan persampahan, meskipun secara umum masih diperlukan penguatan sarana, prasarana, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

2. Ketahanan Pangan (RW Buruan Sae)

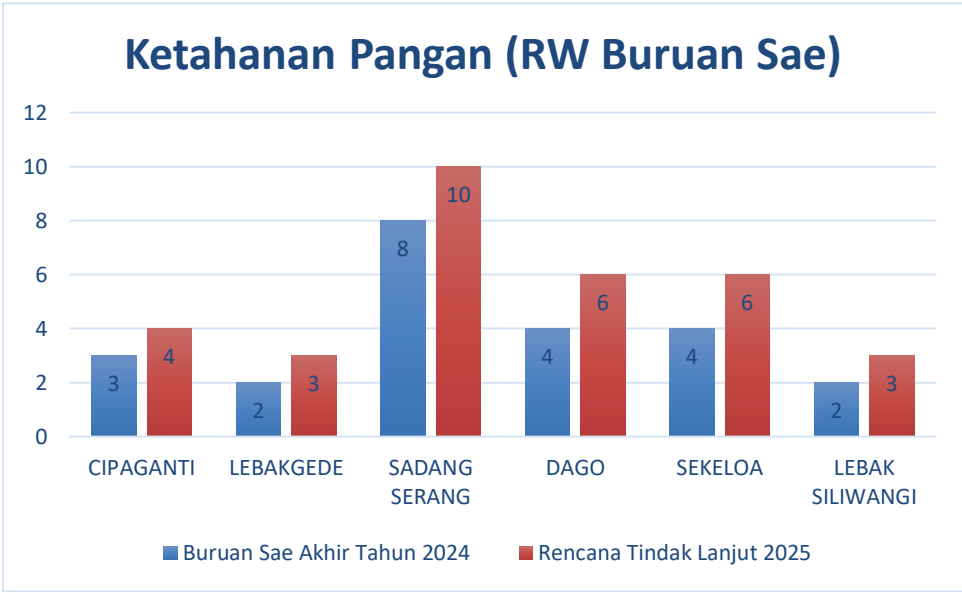
Buruan Sae merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, menciptakan lingkungan yang sehat dan asri dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang tersedia. Idealnya Buruan Sae harus berada di setiap RW yang ada di setiap Kelurahan, namun pada kenyataannya tidak semua RW memiliki Buruan Sae yang keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga.

Berikut data ketersediaan Buruan Sae di wilayah Kecamatan Coblong:

Tabel 2.16 Data Permasalahan Ketahanan Pangan

UNIT KERJA	RW	BURUAN SAE AKHIR TAHUN 2024			TINDAK LANJUT 2025		
		Jml Buruan Sae Aktif	Jml Buruan Sae Tidak Aktif	Total Buruan Sae	Jml Buruan Sae Tahun 2025	Peningkatan/ Pengurangan	Persentasi
CIPAGANTI	7	3	0	3	4	1	57.14
LEBAKGEDE	13	2	0	2	3	1	23.07
SADANG SERANG	21	8	0	8	10	2	47.61
DAGO	13	4	0	4	6	2	46.15
SEKELOA	16	4	0	4	6	2	37.5
LEBAK SILIWANGI	6	2	0	2	3	1	50
TOTAL	76	23	0	23	32	9	42.10

Grafik 2. 4 Ketahanan Pangan (RW Buruan Sae)



Berdasarkan tabel dan grafik data diatas menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Kecamatan Coblong melalui program *Buruan Sae* pada akhir tahun 2024 serta rencana tindak lanjut tahun 2025. Berdasarkan hasil pendataan, dari total 56 RW yang ada, tercatat 14 RW memiliki *Buruan Sae* aktif dan 3 RW dengan *Buruan Sae* tidak aktif, sehingga jumlah keseluruhan mencapai 17 RW. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan melalui *Buruan Sae* belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, mengingat baru sekitar 30% dari total RW yang memiliki kegiatan serupa.

Untuk tahun 2025, Kecamatan Coblong menargetkan peningkatan jumlah RW *Buruan Sae* menjadi 23 RW, atau bertambah 6 RW baru dengan tingkat peningkatan rata-rata sebesar 35,71%. Peningkatan ini bervariasi di setiap kelurahan, di mana Kelurahan Cipaganti dan sedang Serang ditargetkan mencapai peningkatan tertinggi sebesar 50%, sementara Pasirkaliki relatif rendah yakni hanya 10%. Melalui rencana ini, pemerintah kecamatan berupaya memperluas cakupan program *Buruan Sae* guna memperkuat ketahanan pangan keluarga, menyediakan sumber pangan sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan terbatas untuk bercocok tanam.

Dengan demikian, program ketahanan pangan berbasis *Buruan Sae* tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya

peningkatan kualitas lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Coblong. Namun, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berkelanjutan berupa fasilitasi sarana, pendampingan teknis, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar keberlanjutan program dapat terjamin.

3. Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

Kecamatan memiliki peran penting dalam kesehatan masyarakat, terutama dalam hal koordinasi, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan merupakan koordinator dan fasilitator berbagai kegiatan kesehatan di tingkat lokal, juga melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

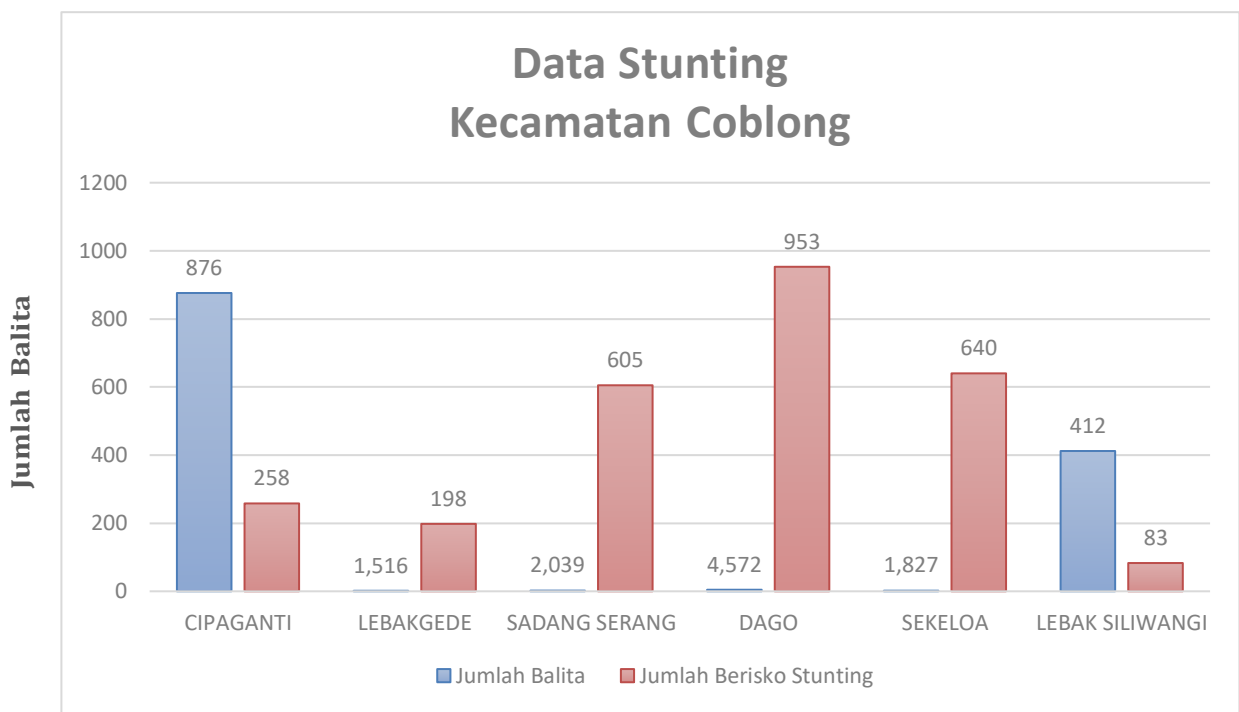
Dalam penanganan stunting, isu utama yang tengah menjadi sorotan adalah tingginya nilai prevalensi stunting pada balita di Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang layak. Sedangkan Prevalensi stunting adalah persentase anak di bawah usia lima tahun yang mengalami stunting.

Berikut adalah data stunting di lingkungan Kecamatan Coblong:

Tabel 2.17 Data Stunting

UNIT KERJA	Kependudukan				Jml Balita Berisiko Stunting	Persentasi Tingkat Penduduk Berisiko Stunting
	RW	RT	Jml KK	Jml Balita		
CIPAGANTI	7	52	2.973	876	258	29,45%
LEBAKGEDE	13	64	2.908	1,516	198	13,06%
SADANG SERANG	21	130	9.580	2,039	605	29,67%
DAGO	13	105	8.723	4,572	953	20,84%
SEKELOA	16	93	4.868	1,827	640	35,03%
LEBAK SILIWANGI	6	23	1.169	412	83	20,15%
TOTAL	76	467	30.221	11242	2737	24,35%

Grafik 2.5 Percepatan Pencegahan Stunting



Berdasarkan data kependudukan, jumlah balita di Kecamatan Coblong pada tahun 2024 tercatat sebanyak 11.242 anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.737 balita yang masuk dalam kategori berisiko stunting, sehingga tingkat prevalensi berisiko stunting di wilayah ini mencapai 24.35%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum prevalensi stunting relatif rendah, upaya pencegahan dan penanganan tetap menjadi prioritas penting mengingat stunting berdampak langsung terhadap kualitas tumbuh kembang anak serta masa depan generasi mendatang.

Jika dilihat per kelurahan, kasus stunting tertinggi terdapat di Kelurahan Sekeloa dengan jumlah 640 balita (35.03%), disusul oleh Sadang Serang dengan 605 balita (29.67%) dan Cipaganti sebanyak 258 balita (29.45%). Sementara itu, Kelurahan Lebakgede mencatatkan jumlah kasus terendah yakni 198 balita (13.06%). Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi kondisi sosial, ekonomi, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam hal gizi dan kesehatan anak.

Melalui data tersebut, Kecamatan Coblong dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat program pencegahan stunting, khususnya pada kelurahan dengan angka prevalensi yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan edukasi gizi bagi keluarga, perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, serta dukungan sarana prasarana posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan di tingkat RW

dan kelurahan. Dengan intervensi yang terarah dan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan angka stunting di Kecamatan Coblong dapat terus ditekan menuju target nasional penurunan stunting.

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Pemukiman (Penyediaan Infrastruktur Dasar)

Tabel 2.18 Sarana Dan Prasarana Kondisi Rusak

• Drainase

UNIT KERJA	Data Drainase Rusak			
	Alamat (Lokasi)	Panjang Drainase	Kondisi (Rusak Ringan/ Berat)	Panjang Drainase Rusak
CIPAGANTI	-	-	-	-
LEBAKGEDE	-	-	-	-
SADANG SERANG	-	-	-	-
DAGO	-	-	-	-
SEKELOA	Jl. Sekeloa Selatan	100.67	Rusak Ringan	100.67
	Jl. Tubagus Ismail I	163.58	Rusak Berat	163.58
	Jl. Tubagus Ismail V	211.33	Rusak Ringan	211.33
LEBAK SILIWANGI	-	-	-	-

Dengan ringkasan diantaranya:

- Rusak Ringan : 2 lokasi (Jl. Sekeloa Selatan dan Jl. Tubagus Ismail V); dan
- Rusak Berat : 1 lokasi (Jl. Tubagus Ismail I).

• Jalan Pemukiman

UNIT KERJA	Data Jalan Rusak			
	Alamat (Lokasi)	Panjang Jalan	Kondisi (Rusak Ringan/ Berat)	Panjang Jalan Rusak
CIPAGANTI	-	-	-	-
LEBAKGEDE	-	-	-	-
SADANG SERANG	Jl. Puyuh Dalam I	110.12	Rusak Ringan	110.12
	Jl. Sadang Saip	810.60	Rusak Ringan	810.60
DAGO	-	-	-	-
SEKELOA	Jl. Kubang Selatan	0.062	Rusak Berat	0.062
	Jl. Sekeloa Selatan	100.67	Rusak Ringan	100.67
	Jl. Sekeloa Selatan II	221.54	Rusak Ringan	221.54
	Jl. Tubagus Ismail XIV	177.60	Rusak Ringan	177.60

Dengan ringkasan diantaranya:

- Rusak Ringan : 5 lokasi

(Jl. Puyuh Dalam I, Jl. Sadang Saip, Jl. Sekeloa Selatan, Jl. Sekeloa Selatan II dan Jl. Tubagus Ismail XIV);dan

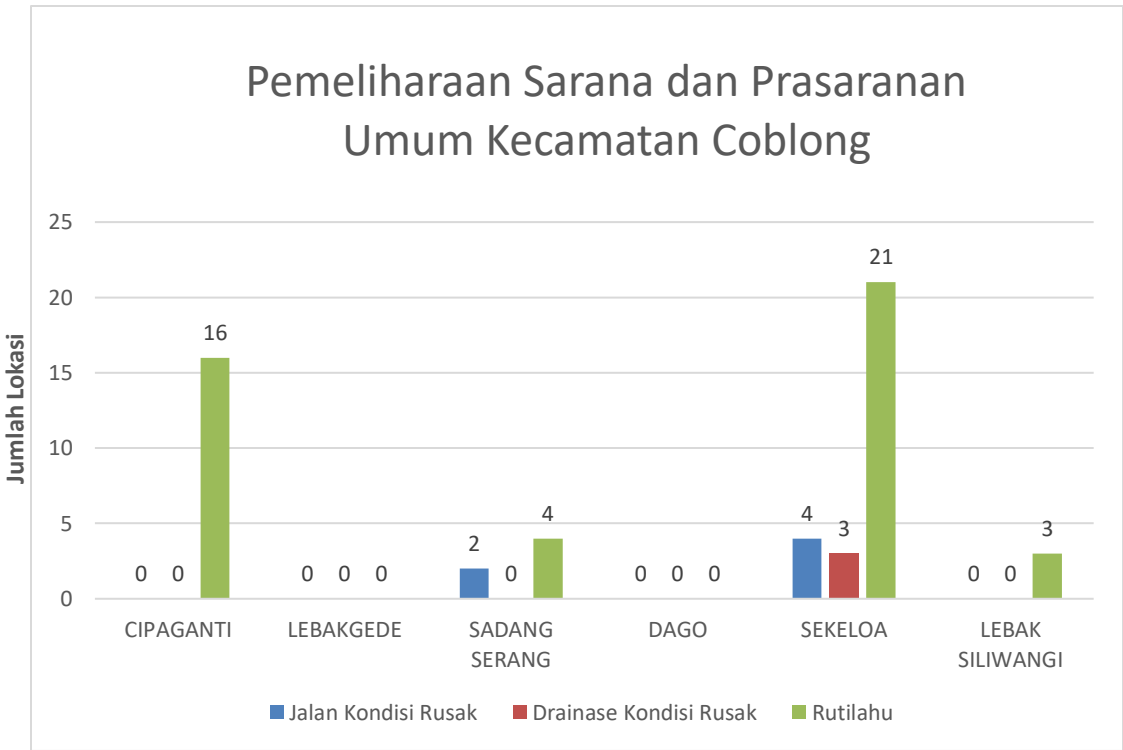
- Rusak Berat : 1 lokasi
(Jl. Kubang Selatan).

Kecamatan Coblong sudah berupaya melakukan pemeliharaan dan perbaikan untuk fasilitas umum infrastruktur kewilayahan sehingga berkurangnya titik genangan saat hujan, jalan yang lebih aman dan nyaman dilalui warga, keluhan masyarakat menurun di beberapa lokasi dan dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat umum.

Tabel 2.19 Rekapitulasi Data Sarana Prasarana Kondisi Rusak

UNIT KERJA	Jumlah Lokasi		
	Jalan Kondisi Rusak	Drainase Kondisi Rusak	Rutilahu
CIPAGANTI	0	0	16
LEBAKGEDE	0	0	0
SADANG SERANG	2	0	4
DAGO	0	0	0
SEKELOA	4	3	21
LEBAK SILIWANGI	0	0	3
TOTAL	6	3	44

Grafik 2. 6 Sarana dan Prasarana Kondisi Rusak



Tabel dan grafik tersebut menyajikan data mengenai kondisi sarana dan prasarana umum di Kecamatan Coblong, yang meliputi jumlah lokasi

jalan rusak, drainase rusak, serta rumah tidak layak huni (rutilahu). Secara keseluruhan, tercatat terdapat 6 lokasi jalan dengan kondisi rusak, 3 lokasi drainase dalam kondisi rusak, serta 44 unit rutilahu yang membutuhkan penanganan. Data ini mencerminkan masih adanya permasalahan infrastruktur dasar di berbagai kelurahan yang perlu mendapatkan prioritas dalam program pemeliharaan dan perbaikan.

Jika ditinjau per kelurahan, kondisi paling menonjol terdapat di Kelurahan Sekeloa, dengan jumlah 4 lokasi jalan rusak, 3 drainase rusak, dan 21 unit rutilahu, Kelurahan Sadang Serang dengan jumlah 2 lokasi jalan rusak dan 4 unit rutilahu, Kelurahan Cipaganti dengan jumlah rutilahu 16 unit dan Kelurahan Lebak Siliwangi dengan jumlah rutilahu 3 unit. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelurahan lainnya, sehingga menunjukkan perlunya intervensi lebih intensif di wilayah tersebut. Sementara itu, kelurahan lain seperti Lebakgede dan Dago memiliki jumlah kerusakan nihil, namun tetap memerlukan perhatian.

Secara umum, data ini menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Coblong perlu didukung oleh program pemeliharaan infrastruktur yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Upaya perbaikan jalan, normalisasi drainase, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keterbatasan sarana prasarana pendukung dan alokasi anggaran masih menjadi tantangan yang perlu dicari solusi agar target pemeliharaan infrastruktur dapat tercapai secara optimal.

5. Penguatan dan Pengembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang juga merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi local.

Berkenaan dengan pembangunan UMKM, pemerintah memiliki peran dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha. Dalam dukungannya terhadap UMKM, Kecamatan memiliki peran seperti berikut:

- 1) Pendataan UMKM;
- 2) Penerbitan surat keterangan domisili usaha;

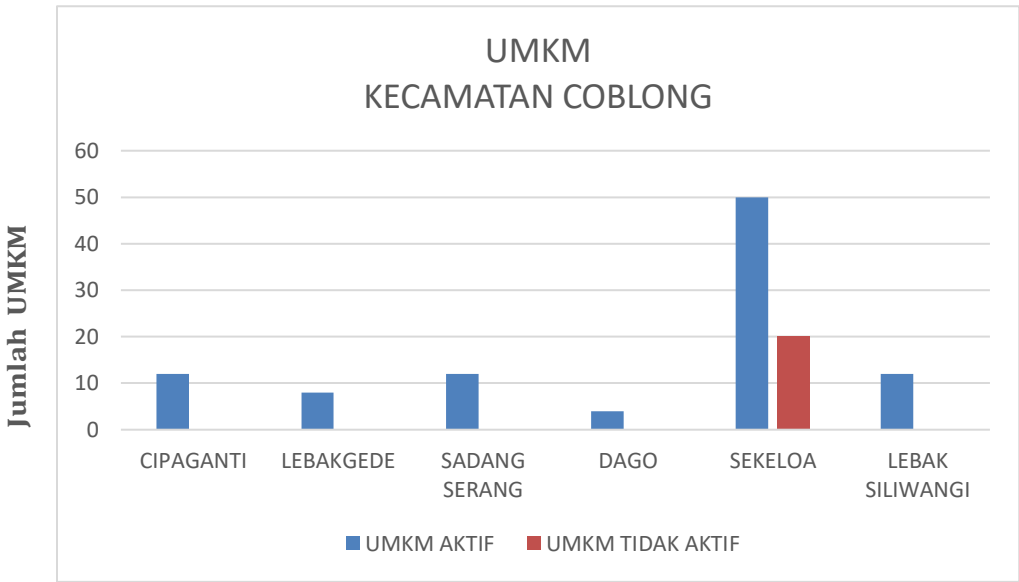
- 3) Rekomendasi pengajuan bantuan modal bagi koperasi dan UMKM;
- 4) Pemberian akses promosi untuk tingkat Kota Bandung, baik melalui keikutsertaan dalam acara pemerintahan maupun dimasukan dalam E-Katalog dan Sosial Media Pemerintah.

Berikut adalah data dari UMKM yang berada di Kecamatan Coblong:

Tabel 2.20 Data UMKM

UNIT KERJA	UMKM		
	Jml UMKM Aktif	Jml UMKM Tidak Aktif	Total UMKM
CIPAGANTI	12	-	12
LEBAKGEDE	8	-	8
SADANG SERANG	12	-	12
DAGO	4	-	7
SEKELOA	50	20	70
LEBAK SILIWANGI	12	-	12
TOTAL	98	20	121

Grafik 2.7 UMKM Kecamatan Coblong



Tabel dan grafik tersebut menyajikan gambaran mengenai kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Coblong. Berdasarkan data yang dihimpun, secara keseluruhan terdapat 121 UMKM, dengan rincian 98 UMKM yang masih aktif dan 20 UMKM yang tidak aktif.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Coblong tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat, dengan tingkat keberlangsungan usaha yang cukup tinggi. Namun demikian, keberadaan sejumlah UMKM tidak aktif, khususnya di wilayah Sekeloa, menjadi indikator perlunya strategi

pemberdayaan yang lebih komprehensif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi akses permodalan, penguatan jaringan pemasaran, serta dukungan regulasi yang berpihak pada pengembangan UMKM.

4. Bidang Urusan Kesejahteraan Sosial

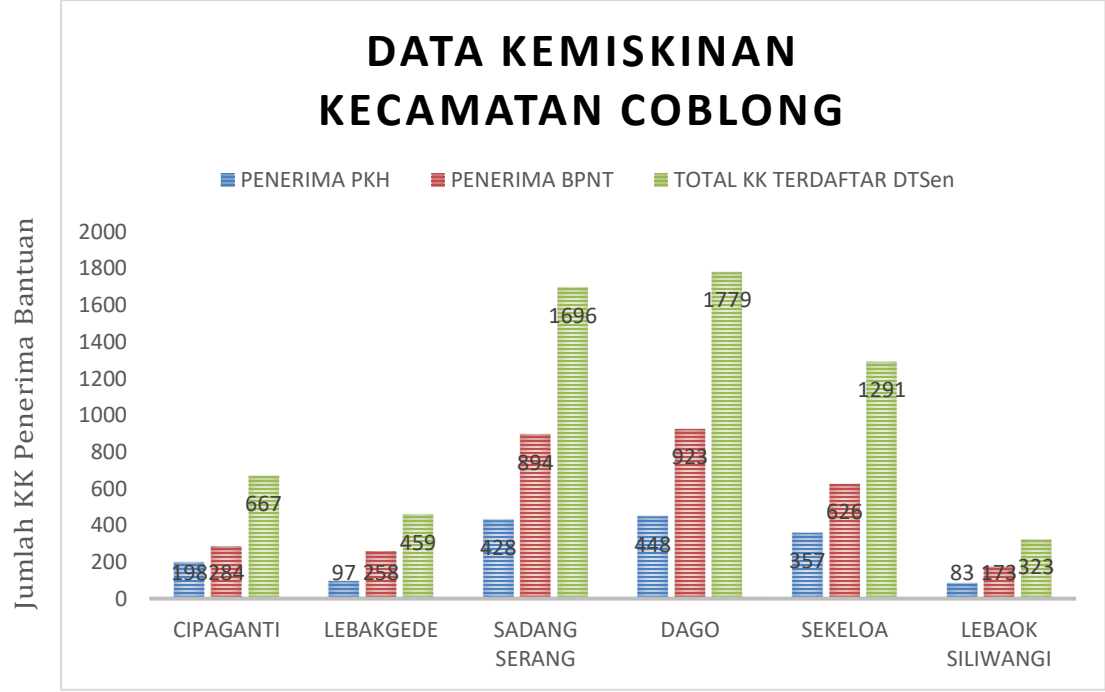
Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ada beberapa jenis kemiskinan, seperti kemiskinan absolut (tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar), kemiskinan relatif (dibandingkan dengan orang lain), kemiskinan kultural (akibat budaya), dan kemiskinan struktural (akibat sistem sosial).

Pendataan data Kemiskinan dan Sosial Ekonomi terdapat dalam DTSEN. DTSEN merupakan singkatan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, adalah basis data terpadu yang menggabungkan data sosial dan ekonomi, yang digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Berikut adalah DTSEN di Kecamatan Coblong:

Tabel 2.21 Data Kemiskinan Kecamatan Coblong

UNIT KERJA	KEPENDUDUKAN				JUMLAH PENDUDUK PRA SEJAHTERA BERDASARKAN KEPALA KELUARGA (Menurut SIKS-NG/DTSen)				
	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	LUAS WILAYAH KM ²	TINGKAT KEPADATAN	PENERIMA PKH	PENERIMA BPNT	LAINNYA SELAIN BPNT PKH	TOTAL	PERSENTASI TINGKAT KEMISKINAN
CIPAGANTI	10695	2973	0,34	34606	198	284	185	667	22,44%
LEBAKGEDE	15573	2908	1,01	11010	97	258	104	459	15,78%
SADANG SERANG	28749	9580	1,33	20205	428	894	374	1696	17,70%
DAGO	29150	8723	2,57	13679	448	923	408	1779	20,39%
SEKELOA	28610	4868	1,17	23150	357	626	308	1291	26,52%
LEBAOK SILIWANGI	3643	1169	1,00	4030	83	173	67	323	27,63%
	116420	30221	7,42	106680	1611	3158	1446	6215	20,57%

Grafik 2.8 Data Kemiskinan Kecamatan Coblong



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat berdasarkan data jumlah Kepala Keluarga (KK) pra-sejahtera yang terdaftar dalam DTKS/DTsen Kecamatan Coblong tahun 2025, tercatat total 6215 KK yang menerima berbagai bentuk bantuan sosial. Kelurahan dengan jumlah penerima DTKS terbanyak adalah Kelurahan Dago dengan 1779 KK, disusul oleh Kelurahan Sadang Serang sebanyak 1696 KK, serta Kelurahan Sekeloa dengan 1696 KK. Sementara itu, jumlah terendah terdapat di Kelurahan Lebak Siliwangi dengan 232 KK, meskipun jika dilihat dari persentasenya terhadap total KK, wilayah ini justru mencatat tingkat kemiskinan yang tertinggi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kelurahan Lebakgede dan Lebak Siliwangi menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Coblong, mengingat jumlah penduduk pra-sejahtera yang tinggi akan berdampak pada tingginya kebutuhan intervensi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, Kelurahan Lebak Siliwangi meskipun jumlah absolutnya lebih rendah, tetap memerlukan perhatian serius karena persentase tingkat kemiskinannya relatif lebih besar dibandingkan kelurahan lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di Kecamatan Coblong tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus berbasis pada kondisi objektif masing-masing kelurahan. Kelurahan dengan jumlah DTKS terbanyak memerlukan

strategi penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja baru, serta fasilitasi akses permodalan. Sedangkan kelurahan dengan persentase kemiskinan tinggi memerlukan program yang lebih menekankan pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi ekonomi keluarga. Dengan pendekatan ini, diharapkan intervensi kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam menekan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Coblong.

5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

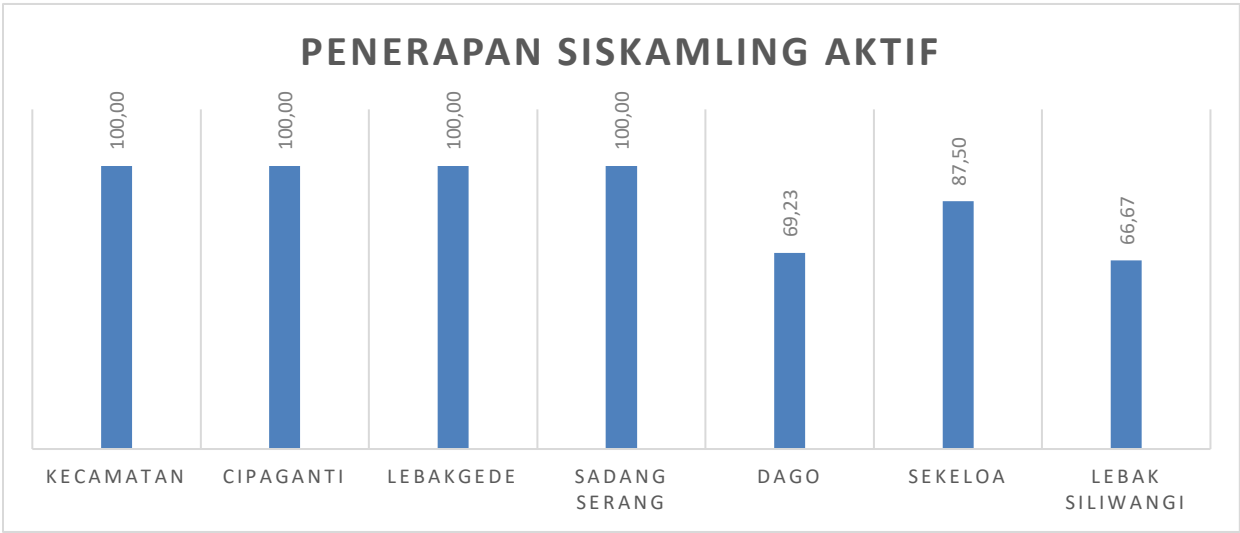
Bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Coblong dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta ketertiban masyarakat di wilayah. Kinerja pada bidang ini meliputi pengendalian aktivitas masyarakat di ruang publik, penanganan potensi gangguan ketertiban, serta penegakan peraturan daerah melalui koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat kewilayahan. Selain itu, Kecamatan Coblong juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kepatuhan hukum, menjaga lingkungan yang kondusif, serta membangun kesadaran kolektif dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, upaya penanganan ketertiban umum difokuskan pada pengendalian permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan keresahan, seperti keberadaan pedagang kaki lima di lokasi yang tidak semestinya, praktik premanisme, dan kurangnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan patroli, sosialisasi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor, Kecamatan Coblong berusaha menciptakan ketertiban wilayah yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Coblong diharapkan mampu memperkuat stabilitas sosial, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Adapun Data Satlinmas dan Satkamling Aktif di wilayah Kecamatan Coblong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22 Data Satlinmas dan Satkamling Aktif

NO	UNIT KERJA	JUMLAH RW	SATLINMAS AKTIF		SATKAMLING AKTIF	% PENERAPAN SATKAMLING RW AKTIF
			PETUGAS LINMAS KANTOR	PETUGAS LINMAS RW		
1	KECAMATAN		30			100,00
2	CIPAGANTI	7	10		7	100,00
3	LEBAKGEDE	13	10	40	13	100,00
4	SADANG SERANG	21	9	42	21	100,00
5	DAGO	13	10	13	9	69,23
6	SEKELOA	16	9	39	14	87,50
7	LEBAK SILIWANGI	6	10	28	4	66,67
TOTAL		76	88	162	68	

Grafik 2.9 Grafik Satlinmas dan Satkamling



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, jumlah petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kecamatan Coblong tercatat sebanyak 88 orang petugas Linmas kantor dan 162 petugas Linmas di tingkat RW. Selain itu, tercatat pula terdapat 68 Satkamling RW aktif yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Data ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya ketertiban umum dan pencegahan potensi gangguan keamanan di wilayah kecamatan.

Dari sisi persentase penerapan Satkamling RW aktif, terlihat adanya variasi antar kelurahan. Kelurahan Cipaganti, Leakgede, dan Sadang Serang menunjukkan capaian 100% penerapan Satkamling RW aktif, yang menandakan bahwa seluruh RW di wilayah tersebut memiliki sistem keamanan lingkungan yang berjalan dengan baik. Kecamatan Coblong secara keseluruhan juga mencapai 100%, yang mencerminkan keberhasilan koordinasi di tingkat kecamatan.

Namun demikian, masih terdapat ketimpangan di beberapa wilayah. Kelurahan Dago hanya mencapai 69.23%, menandakan masih adanya RW yang belum menerapkan Satkamling aktif. Kondisi serupa juga terlihat di Kelurahan Sekeloa yang hanya mencapai 87.50% dan Kelurahan Lebak Siliwangi hanya mencapai 66.67%, sehingga memerlukan perhatian serius dalam memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam menginisiasi kegiatan keamanan lingkungan, meskipun secara administrasi angkanya melebihi standar.

Secara umum, data tersebut mengindikasikan bahwa meskipun Kecamatan Coblong telah menunjukkan capaian yang baik dalam pembentukan Satlinmas dan penerapan Satkamling, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan konsistensi penerapan di seluruh kelurahan, terutama di wilayah dengan persentase rendah seperti Dago, Sekeloa dan Lebak Siliwangi, sekaligus menjaga keberlanjutan di kelurahan dengan capaian tinggi seperti Cipaganti, Lebakgede dan Sadabf Serang.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Coblong sebagai unit pelayanan publik di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan yang cepat, tepat dan akuntabel kepada seluruh lapisan masyarakat. Kelompok sasaran utama dari pelayanan Kecamatan Coblong mencakup berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan pemerintahan, kependudukan dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan peta proses bisnis yang dimiliki oleh Kecamatan, berikut adalah kelompok sasaran Layanan dari Kecamatan Coblong:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat di wilayah Kecamatan Coblong menjadi sasaran utama dari seluruh area pelayanan publik. Mulai dari layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan pelayanan langsung lainnya.

2. Pelaku Ekonomi Lokal dan UMKM

Pelaku Ekonomi Lokal menjadi salah satu sasaran yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas wilayah.

3. PPKS (Pemerlu Pelayanaan Kesejahteraan Sosial)

PPKS menjadi salah satu sasaran penerima layanan sosial, program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi kegiatan penguatan kapasitas

4. LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan)

Kecamatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui mitra di tengah masyarakat yang disebut sebagai LKK. LKK sendiri terdiri dari RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM, dan Posyandu. Menjadi salah satu sasaran untuk memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan penyampaian informasi kepada warga.

5. Internal Pegawai (ASN Non ASN)

Pegawai internal sendiri menjadi salah satu sasaran layanan Kecamatan. Fokus layanan yang dilakukan pada internal pegawai adalah pengembangan kapasitas, dan pembinaan kinerja untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan publik

Melalui pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan warga Kecamatan Coblong berupaya memastikan bahwa seluruh kelompok sasaran dapat mengakses layanan secara adil, transparan dan berkualitas, sejalan dengan prinsip pelayanan prima dan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika masyarakat.

2.1.5. Mitra Kecamatan Coblong

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, Kecamatan Coblong secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Mitra-mitra yang terlibat berasal dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan kewilayahan.

Mitra yang terlibat di Kecamatan Coblong turut berperan dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Kecamatan Coblong, antara lain pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, penguatan UMKM, pengelola lingkungan, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan kapasitas aparatur kewilayan. Bentuk dukungan mitra dapat berupa teknis, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, hingga fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kolaborasi yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dan menciptakan inovasi yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Kemitraan yang dibangun dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kesejahteraan warga Coblong. Mitra Kecamatan Coblong dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan percepatan pencapaian target pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23
Mitra Kecamatan Coblong dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Percepatan Pencapaian Target Pembangunan

No	Mitra PD	Uraian / Kriteria Yang Diintervensi
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Koordinasi / Penyuluhan / Pelatihan terkait Ketahanan Pangan (seperti : Pemberian Bibit Tanaman, bibit ikan lele, bibit ayam)
2	Dinas Sosial	Koordinasi terkait verifikasi dan pendataan penerima manfaat (BPNT) dan bantuan sosial lainnya
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Keliling Mepeling (Pengurusan Pelayanan KK, KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian), adanya petugas Disdukcapil yang ditempatkan / diperbantukan di kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kependudukan
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Adanya PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang bertugas untuk melaksanakan, mengelola dan menggerakkan program kependudukan dan keluarga berencana di kecamatan
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Coblong
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kolaborasi pengadaan Bazar murah

No	Mitra PD	Uraian / Kriteria Yang Diintervensi
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha), izin usaha mikro kecil, izin usaha menengah/besar
8	Dinas Kesehatan	koordinator teknis intervensi gizi spesifik melalui Puskesmas yang ada di kecamatan, pelatihan kepada kader posyandu, melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dan sosialisasi dan penyediaan sarana pendukung (alat ukur tinggi/berat badan)
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Sarana Air Bersih (SAB), Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pembangunan Septictank Komunal
10	Dinas Lingkungan Hidup	Menyediakan dan mengawasi fasilitas persampahan (TPS, armada angkut sampah), Program Bank Sampah dan 3 R (reduce, reuse, recycle)
11	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinasi dan kolaborasi dalam penegakan Perda dan Perkada, menindak pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan, melaksanakan operasi bersama penertiban PKL, Parkir liar, Reklame liar, operasi miras dan Bangunan tanpa izin, membina dan mengkoordinasikan linmas di tingkat kelurahan, membantu penguatan Pos Kamling

Tabel diatas menggambarkan bentuk kolaborasi antara Kecamatan Coblong dengan perangkat daerah (PD) dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian target pembangunan. Kolaborasi ini mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari ketahanan pangan, sosial, kependudukan, hingga penataan ruang dan ketertiban umum. Setiap perangkat daerah memiliki peran spesifik yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui penyediaan fasilitas, pemberdayaan, maupun pendampingan teknis.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Coblong, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Coblong dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Coblong sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah yang menjadikan Kecamatan berfungsi sebagai fasilitator, menjadikan ruang gerak kecamatan menjadi lebih sempit; dan
2. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Coblong.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Coblong dapat diidentifikasi permasalahan berdasarkan bidang urusan kegiatan di Kecamatan Coblong, sebagai berikut:

a) Permasalahan Bidang Urusan Kesekretariatan

1. Permasalahan Kekosongan Jabatan (Pegawai)

Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya jumlah ASN pada setiap kelurahan. Rata-rata kelurahan hanya memiliki 4 hingga 5 pegawai, padahal kebutuhan ideal ditetapkan sebanyak 9 orang. Kondisi ini dapat berdampak pada beban kerja yang tidak seimbang, di mana pegawai yang tersedia harus merangkap beberapa fungsi pelayanan. Kekurangan tenaga fungsional juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi, pelayanan teknis, serta pengelolaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

Selain keterbatasan jumlah pegawai, proporsi Non-ASN yang cukup tinggi (35 orang atau sekitar 30% dari total pegawai) menunjukkan adanya ketergantungan pada tenaga non-permanen dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan. Hal ini berpotensi menimbulkan kendala dalam kesinambungan pelayanan, mengingat status Non-ASN memiliki keterbatasan dari sisi kapasitas, hak, dan kewajiban formal dibandingkan ASN. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis berupa penataan kebutuhan pegawai, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengajuan formasi tambahan ASN untuk mengisi kekosongan yang ada.

2. Permasalahan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor

Masih terdapat sejumlah keterbatasan yang berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan publik serta penyelenggaraan urusan pemerintahan. Gedung kantor Kecamatan Coblong dalam kondisi baik, namun memerlukan perluasan lahan parkir mengingat keterbatasan area yang tersedia untuk menampung kendaraan pegawai maupun masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta mengganggu kelancaran aktivitas pelayanan.

Ketersediaan sarana pendukung berupa ruang rapat, komputer/laptop, mesin printer/scanner, serta arsip dan lemari penyimpanan masih belum sepenuhnya memadai. Sebagian perangkat komputer memerlukan peremajaan karena keterbatasan usia dan performa, yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan pekerjaan administrasi maupun pelayanan publik. Selain itu, kapasitas arsip dan lemari penyimpanan masih terbatas sehingga menyulitkan dalam pengelolaan dokumen penting secara tertib dan berkesinambungan.

Permasalahan yang cukup mendasar adalah pada kondisi bangunan Gedung kantor yang dinilai baik tetapi keterbatasan lahan yang mengakibatkan kurang memadainya lahan parkir dan halaman kantor yang berdampak kenyamanan warga saat menerima pelayanan dan kenyamanan pada saat menerima kunjungan tamu.

b) Permasalahan Bidang Urusan Pemerintahan

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana penunjang pelayanan, termasuk ruang pelayanan yang belum sepenuhnya memadai untuk menampung jumlah warga yang cukup banyak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan;
2. Kondisi Lahan Parkir yang sudah tidak representatif menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan. Keterbatasan tersebut sering menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan, baik dari warga maupun tamu yang berkunjung. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran pelayanan serta citra pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang tertib dan teratur;

3. Belum Optimalnya Penerapan SMM ISO 9001:2015, hal ini dikarenakan implementasi standar mutu tersebut baru mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga masih memerlukan proses adaptasi dan penyesuaian di berbagai aspek, baik dari sisi regulasi internal, prosedur kerja, maupun budaya organisasi; dan
4. Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas Aparatur, khususnya dalam hal penyusunan dokumen mutu, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut perbaikan berkelanjutan. Keterbatasan pemahaman ini berpotensi menghambat konsistensi penerapan sistem, sehingga hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan utama peningkatan kualitas pelayanan public.

c) Permasalahan Bidang Urusan Pemberdayaan

Bidang urusan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup warga serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung, tetapi juga mencakup aspek koordinasi, keberlanjutan program, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Secara umum, permasalahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat perlu diidentifikasi secara komprehensif agar dapat dirumuskan langkah strategis yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program pemberdayaan benar-benar memberikan dampak positif, baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun terhadap penguatan kelembagaan sosial di wilayah Kecamatan Coblong. Adapun permasalahan yang menjadi fokus program kegiatan strategis di kecamatan Coblong diantaranya:

1. Penanganan Sampah/Percepatan Pencapaian RW Kawasan Bebas Sampah (KBS)

Dari tabel 2.14 diketahui bahwa masing-masing Kelurahan telah memiliki tempat untuk pengolahan sampah baik organik, anorganik, maupun residu. Namun ketersediaan tersebut masih

memiliki hambatan dalam pelaksanaannya sehingga belum berjalan secara optimal, hal tersebut di antaranya adalah:

- Tempat pengolahan sampah tidak ada di setiap lingkungan RW sehingga masih sulit dijangkau oleh warga di RW lainnya;
- Lokasi tempat pengolahan sampah berada di fasos fasum yang peruntukannya untuk kebutuhan lain (seperti jalan lingkungan untuk warga) sehingga harus direlokasi;
- Lokasi tempat pengolahan sampah kurang memadai sehingga proses pengolahan sampah tidak berjalan optimal;
- Kurangnya sampah organik sebagai bahan makanan bagi maggot (Rumah Maggot);
- Banyaknya hama seperti tikus dan burung yang seringkali merusak dan/atau memakan maggot (Rumah Maggot);
- Kurangnya sarana dan prasarana pada tempat pengolahan sampah, seperti Mesin Pencacah yang rusak, kurangnya gerobak sampah untuk mengangkut sampah yang telah terpilah ke lokasi pengolahan sampah, kurangnya bahan bakar minyak sebagai bahan bakar mesin pencacah, kurangnya wadah untuk menyimpan sampah organik dari warga, dll;
- Kurangnya sarana dan prasana untuk pemilahan sampah di lingkungan masyarakat, seperti misalnya tempat sampah terpilah yang masih minim tersedia;
- Banyaknya pengepul barang rongsok sehingga Bank Sampah tidak dapat memaksimalkan potensinya;
- Kurang banyaknya petugas pengangkut sampah untuk memaksimalkan pemilahan sampah di rumah tangga;
- Masih disatukannya sampah yang telah dipilah warga oleh petugas pengangkut sampah karena kekurangan sarana dan prasarana, dan kurangnya pemahaman terkait pemilahan sampah;
- Kurangnya ritasi pengangkutan sampah residu oleh DLH pada TPS yang seringkali mengakibatkan penumpukan sampah di TPS;

- Lokasi TPS yang berada di pinggir jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan situasi lingkungan yang tidak tertata.

2. Ketahanan Pangan (RW Buruan Sae)

- Rendahnya Partisipasi Masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program Buruan SAE masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari jumlah rumah tangga yang aktif berpartisipasi masih terbatas, sehingga dampak yang diharapkan terhadap peningkatan ketahanan pangan belum tercapai secara maksimal. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya program ini menjadi faktor utama yang perlu mendapat perhatian.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pegiat Buruan SAE. Ketersediaan SDM yang secara khusus menjadi penggerak program Buruan SAE masih sangat terbatas. Pegiat yang ada belum merata di seluruh RW, sehingga kegiatan pengembangan urban farming tidak berjalan konsisten. Kekurangan SDM ini berpotensi memperlambat akselerasi program dan menghambat target peningkatan jumlah RW Buruan SAE.
- Kurangnya Pemahaman dan Edukasi untuk Pegiat Buruan SAE. Edukasi dan pelatihan teknis terkait urban farming, pengelolaan lahan, serta pemanfaatan teknologi pertanian perkotaan masih belum optimal. Hal ini berdampak pada kurangnya keterampilan pegiat dalam mengelola lahan yang terbatas agar tetap produktif dan berkelanjutan. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan sering kali tidak konsisten dan kurang menghasilkan manfaat optimal.
- Keterbatasan Lahan. Keterbatasan lahan di wilayah Kecamatan Coblong menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan Buruan SAE. Kondisi lingkungan perkotaan yang padat permukiman menyebabkan sulitnya penyediaan lahan khusus untuk kegiatan urban farming. Hal ini membatasi ruang gerak program sehingga hanya dapat dijalankan di beberapa lokasi yang memiliki ketersediaan lahan.

- Kurangnya Pendampingan dari Dinas Terkait. Koordinasi dan pendampingan teknis dari dinas atau instansi terkait masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pendampingan mengakibatkan pegiat Buruan SAE kurang memperoleh arahan, inovasi, serta dukungan teknis yang berkesinambungan. Kondisi ini berdampak pada lambatnya perkembangan program serta belum tercapainya standar keberhasilan yang diharapkan.

3. Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

- Kurangnya Literasi dan Penerapan Ilmu Parenting. Salah satu faktor utama penyebab stunting adalah rendahnya literasi serta penerapan ilmu parenting yang dimiliki oleh sebagian ibu. Pengetahuan mengenai pola asuh, pemberian nutrisi yang tepat, serta stimulasi tumbuh kembang anak masih terbatas. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya perkembangan balita, meskipun akses terhadap layanan kesehatan sudah tersedia.
- Kurangnya Pemeriksaan Rutin pada Balita. Kegiatan pemeriksaan rutin secara berkala pada balita masih belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam mengetahui kondisi gizi maupun perkembangan anak. Minimnya kesadaran orang tua untuk melakukan pemantauan kesehatan balita secara teratur memperbesar risiko terjadinya stunting.
- Kurangnya Pendeteksian Dini pada Ibu Hamil. Upaya pencegahan stunting melalui pendeteksian dini terhadap ibu hamil masih belum maksimal. Padahal, intervensi pada masa kehamilan sangat krusial untuk memastikan kesehatan janin dan mencegah risiko stunting sejak dini. Keterbatasan edukasi, kesadaran, serta cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil menjadi kendala utama.
- Masih Adanya Kepercayaan pada Tradisi Lama. Sebagian masyarakat masih memegang kepercayaan atau tradisi lama yang kurang sesuai dengan prinsip kesehatan modern, khususnya terkait pola asuh dan pemberian nutrisi. Tradisi ini sering kali bertentangan dengan praktik medis yang

dianjurkan, sehingga dapat memengaruhi kualitas tumbuh kembang balita dan menghambat upaya pencegahan stunting.

- Kurangnya Dukungan Keluarga dan Masyarakat. Pemantauan tumbuh kembang balita tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Namun, keterlibatan keluarga maupun lingkungan dalam mendukung pola asuh sehat masih rendah, sehingga beban utama hanya ditanggung oleh ibu. Kondisi ini menyebabkan kurangnya keberlanjutan dalam pemantauan perkembangan anak.
- Kurangnya Pendampingan dari Dinas Terkait. Pendampingan intensif dari dinas atau instansi terkait masih perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk edukasi, monitoring, maupun penyediaan sarana pendukung kesehatan ibu dan anak. Minimnya pendampingan mengakibatkan kurangnya arahan teknis dan keberlanjutan program, sehingga upaya percepatan penurunan angka stunting belum berjalan secara maksimal.

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Pemukiman (Penyediaan Infrastruktur Dasar)

Permasalahan banjir yang kerap terjadi di wilayah Kelurahan Lebakgede (merupakan salah satu isu strategis yang membutuhkan perhatian serius, kondisi ini disebabkan oleh tidak optimalnya fungsi drainase serta penyempitan badan sungai yang melewati kawasan tersebut.

Penyempitan aliran air mengakibatkan berkurangnya kapasitas tampung, sehingga pada saat curah hujan tinggi, air meluap dan menimbulkan genangan maupun banjir di pemukiman warga. Keadaan ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian material maupun ancaman kesehatan masyarakat akibat lingkungan yang tergenang.

Selain faktor teknis, permasalahan dalam aspek kewenangan administrasi wilayah. Letak geografis Kelurahan Lebakgede yang berbatasan langsung dengan Kota Cimahi menjadikan penanganan

banjir kerap terkendala koordinasi lintas daerah, Perbedaan kewenangan antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi dalam pengelolaan drainase serta normalisasi sungai menyebabkan upaya penanganan belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada lambatnya implementasi solusi permanen, sehingga masyarakat masih terus menghadapi risiko banjir yang berulang.

Permasalahan banjir di kawasan Perempatan Jalan Pajajaran dan Pasirkaliki merupakan salah satu isu krusial yang mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat dan fungsi wilayah sebagai pusat perekonomian serta pergerakan lalu lintas. Tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi faktor utama yang memperbesar risiko banjir, terutama karena kondisi infrastruktur drainase di kawasan tersebut belum terpelihara dengan baik. Drainase yang mengalami kerusakan maupun penumpukan sedimentasi mengakibatkan kapasitas alirannya semakin berkurang, sehingga air tidak dapat tersalurkan secara optimal dan meluap ke jalan raya.

Selain faktor teknis, kondisi banjir semakin diperparah oleh minimnya area resapan air di wilayah perkotaan yang padat bangunan. Kurangnya ruang terbuka hijau dan dominasi lahan terbangun mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga seluruh limpasan air langsung menuju ke saluran drainase yang kapasitasnya terbatas. Di sisi lain, perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke saluran air turut memperburuk keadaan. Sampah yang menumpuk di drainase menyebabkan tersumbatnya aliran, sehingga mempercepat terjadinya genangan bahkan banjir di saat hujan dengan intensitas tinggi.

Dengan demikian, banjir di Perempatan Pajajaran–Pasirkaliki tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur drainase yang kurang terawat, sedimentasi yang menumpuk, minimnya daerah resapan air, serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Permasalahan ini memerlukan penanganan terpadu baik dari sisi teknis, pengelolaan tata ruang, maupun peningkatan kesadaran

masyarakat agar permasalahan banjir dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

Faktor penyebab permasalahan Jalan rusak atau tidak terpelihara di Kecamatan Coblong adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya permukaan jalan yang cepat rusak karena genangan air hujan;
- b. Banyaknya pekerjaan pengaspalan yang kurang tebal sehingga menjadi mudah terkikis dan berlubang;
- c. Adanya pembongkaran jalan karena proyek penggalian (seperti penggalian kabel dan PDAM);
- d. Belum semua wilayah terlayani pembangunan jalan karna keterbatasan anggaran;
- e. Beberapa RT/RW belum aktif mengusulkan pembangunan jalan lingkungan;
- f. Belum adanya SK pelimpahan kepemilikan jalan untuk menjadi fasilitas social dan fasilitas umum.

Adapun dampak yang ditimbulkan permasalahan jalan rusak dan drainase rusak adalah sebagai berikut:

- Dampak permasalahan jalan rusak
 1. Menurunnya Kelancaran Mobilitas Masyarakat
 2. Meningkatnya Risiko Kecelakaan Lalu Lintas
 3. Terganggunya Distribusi Barang dan Jasa
 4. Meningkatnya Biaya Perawatan Kendaraan
 5. Turunnya Citra dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah
 - Dampak permasalahan drainase rusak
 1. Meningkatnya Risiko Banjir dan Genangan Air
 2. Kerusakan pada Infrastruktur Lain
 3. Terganggunya Kesehatan Masyarakat
 4. Penurunan Kualitas Lingkungan
 5. Terganggunya Aktivitas Ekonomi dan Sosial
 6. Meningkatnya Beban Anggaran Pemerintah
5. Penguatan dan Pengembangan UMKM
- Produk UMKM Kurang Beragam. Sebagian besar pelaku UMKM di wilayah Kecamatan masih berfokus pada produk makanan, sehingga kurang adanya variasi produk yang

dapat membuka peluang pasar lebih luas. Minimnya diversifikasi produk berdampak pada keterbatasan potensi pengembangan usaha dan daya tarik konsumen.

- Permasalahan Modal Usaha. Keterbatasan modal usaha menjadi kendala utama bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi, maupun memperluas jaringan pemasaran. Akses terhadap lembaga keuangan formal juga masih dirasakan sulit oleh sebagian pelaku usaha.
- Kesulitan Mendapatkan PIRT. Sebagian UMKM mengalami kendala dalam memperoleh Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebagai salah satu syarat legalitas produk makanan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman prosedur, keterbatasan informasi, maupun terbatasnya pendampingan dari pihak terkait.
- Pemasaran Produk Masih Terbatas. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan pemasaran konvensional, sehingga jangkauan konsumen relatif kecil. Belum optimalnya pemanfaatan platform digital turut membatasi daya jangkau pemasaran.
- Keterbatasan Pelatihan Wirausaha. Program pelatihan wirausaha yang ada belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas manajerial, inovasi produk, maupun keterampilan pemasaran digital bagi pelaku UMKM. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.
- Kurangnya Dukungan Pemasaran dari Pemerintah maupun Swasta. Dukungan dalam bentuk promosi, fasilitasi pameran, maupun kerja sama dengan pihak swasta masih terbatas. Akibatnya, UMKM belum mendapatkan kesempatan optimal untuk memperluas pangsa pasar secara berkelanjutan.
- Daya Saing di Era Digital Masih Rendah. Perkembangan teknologi digital menuntut UMKM untuk adaptif dalam pemasaran, promosi, dan transaksi online. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum mampu memanfaatkan

teknologi digital secara efektif, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun sarana pendukung.

d) Bidang Urusan Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Ada beberapa jenis kemiskinan, seperti kemiskinan absolut (tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar), kemiskinan relatif (dibandingkan dengan orang lain), kemiskinan kultural (akibat budaya), dan kemiskinan struktural (akibat sistem sosial).

Permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Coblong diantaranya:

1. Banyaknya Masyarakat dengan pendapatan rendah dikarenakan berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas sehingga kesejahteraannya masih kurang;
2. Banyaknya Masyarakat dengan Pendidikan dan Keterampilan rendah;
3. Banyaknya Masyarakat yang Tinggal di rumah tak layak;
4. Banyaknya Masyarakat yang Tidak mendapatkan akses layanan Kesehatan;
5. Banyaknya Masyarakat yang Tidak memiliki BPJS dengan biaya pribadi;
6. Banyaknya Masyarakat yang ketergantungan bantuan pemerintah;
7. Banyaknya Masyarakat yang Kurang mendapatkan pelatihan dan pembinaan;
8. Banyaknya data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, dikarenakan banyak warga yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan tapi masih terdata di DTESN. Namun sebaliknya, banyak warga miskin yang belum masuk ke DTESN dikarenakan kurangnya pemahaman warga dalam proses pendataan.

9. Tumpang tindih program bantuan karena data DTESN tidak selalu sinkron antara Perangkat Daerah ataupun Lembaga lain (seperti BPJS, Dinsos, Kemensos);
10. Data warga di DTSEN masih banyak yang tidak sesuai dengan hasil Desil;
11. Data warga di DTSEN belum bisa di filter lebih detail (jadi hanya filter jumlah saja bukan per-BNBA);
12. Belum ada basis data lansia terlantar, disabilitas, anak yatim di tingkat RT/RW;
13. Pemutakhiran data yang kurang valid;
14. Masih adanya dobel penerimaa bantuan PKH dan BPNT;
15. Kuota pengajuan bansos yang terbatas.

e) Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi untuk menjaga stabilitas, menciptakan suasana aman, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang terjaga dengan baik menjadi prasyarat utama dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah, peningkatan perekonomian, serta harmonisasi kehidupan sosial di tengah masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang menghambat terwujudnya situasi yang kondusif di wilayah Kecamatan. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan praktik pelanggaran hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam melakukan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini menuntut adanya langkah strategis dan terukur dari pemerintah kecamatan bersama aparat terkait agar permasalahan dapat diminimalisir serta tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun permasalahan utama dan dampak yang mungkin di timbulkan yang ada di wilayah Kecamatan Coblong diantaranya seperti:

1. Masih adanya praktik premanisme, baik secara individu maupun kelompok. Praktik premanisme yang dilakukan secara individu maupun berkelompok masih menjadi persoalan serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. Fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti pungutan liar, intimidasi, maupun penguasaan ruang publik secara tidak sah. Permasalahan ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta keterbatasan upaya pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif dan tertib hukum.

Dampak: Kondisi ini berpotensi menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, serta menurunkan citra positif wilayah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif;

2. Ketidaktegasan hukum dan keterbatasan lapangan kerja. Faktor ketidakpastian dalam penegakan hukum serta keterbatasan kesempatan kerja menjadi pemicu tumbuhnya kelompok masyarakat yang kurang produktif dan berperilaku menyimpang. Kelompok ini sering kali mengembangkan pola hidup yang merugikan masyarakat, antara lain melalui tindakan kriminal kecil hingga praktik premanisme yang meresahkan.

Dampak: Apabila dibiarkan, hal ini akan mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat, serta menurunnya ketertiban umum;

3. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda). Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah mengakibatkan sebagian masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban mereka, serta ketentuan yang berlaku dalam menjaga ketertiban. Minimnya pengetahuan tersebut berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran aturan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Dampak: Hal ini menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas di lapangan, memicu meningkatnya

pelanggaran, serta melemahkan wibawa peraturan daerah sebagai instrumen hukum daerah;

4. Kurangnya koordinasi antara kewilayahan dan Satpol PP dalam penanganan PKL. Penanganan permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menghadapi kendala akibat kurangnya sinergi antara perangkat kewilayahan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Kondisi ini membuat upaya penataan PKL belum berjalan efektif, sehingga menimbulkan ketidaktertiban pemanfaatan ruang publik. Dampak: Akibatnya, terjadi kesemrawutan tata ruang kota, meningkatnya potensi konflik antara aparat dan masyarakat, serta berkurangnya kenyamanan dan kelancaran aktivitas di fasilitas umum.

2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

2.2.2.1. Telaahan Isu global

Perkembangan Kecamatan Coblong Kota Bandung tidak saja dipengaruhi berbagai faktor internal, namun juga eksternal. Faktor eksternal yang dapat diidentifikasi antara lain dinamika lingkungan di tingkat global/internasional, nasional, dan regional. Beberapa isu global yang dapat memengaruhi pembangunan di Kecamatan Coblong Kota Bandung, antara lain:

1. Perkembangan demografi global. Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55 persen).
2. Geopolitik dan geoekonomi. Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen. Perkembangan teknologi.
3. Teknologi akan menggantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini.
4. Peningkatan urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen.
5. Konstelasi perdagangan global. Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun.

6. Tata kelola keuangan global. Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency (CBDB)*, dan *Fintech*.
7. Pertumbuhan kelas menengah (middle class). Jumlah middle dan upper class lebih dari 90 persen (8,8 miliar).
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.
9. Perubahan iklim. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.
10. Pemanfaatan luar angkasa (space economy). Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.

2.2.2.2. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misi RPJMN merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air;

ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 2.3 Prioritas Pembangunan
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

2.2.2.3. **Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029**

Pembangunan jangka menengah Kecamatan Coblong Kota Bandung merupakan bagian dari pembangunan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Kecamatan Coblong Kota Bandung, memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 yaitu:

- 1. Green dan blue economy;
- 2. Kualitas dan daya saing SDM;
- 3. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar;
- 4. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 5. Keberlanjutan penataan ruang;
- 6. Kualitas tata kelola pemerintahan.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 adalah:

JABAR ISTIMEWA
Situasi Kondisi Terunggul, Termaju, Paripurna, dan Teratas

Dalam mencapai visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

2.2.2.4. Telaahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

Setelah memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lalu selanjutnya memerhatikan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029. Sehingga dalam Pembangunan jangka menengah dan penyusunan Renstra Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2025-2029 dapat sejalan dan selaras dalam penentuan tujuan daerah.

Adapun isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2025-2029 yaitu:

1. Bonus Demografi, Peningkatan Populasi Lansia, dan Transisi Demografi;
2. Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi;
3. Pengembangan Transportasi Publik, Dominasi Kendaraan Pribadi, dan Orientasi Transit;
4. Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan;
5. Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia;
6. Ekspansi Ekspor, Dominasi Nasional, dan Posisi Kota Kreatif Global;
7. *Integrasi Smart City dan Dominasi Artificial Intelligence & Internet of Things;*
8. Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
9. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Peningkatan Wisatawan; dan
10. Pelestarian Budaya.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Bandung Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM Mendukung Pembangunan Nasional”

Visi ini menegaskan tekad Kota Bandung untuk membangun dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, serta tata kelola yang melayani dan responsif. Visi ini juga menjadi jawaban atas tantangan multidimensional, seperti:

- Urbanisasi yang cepat dan tidak merata;
- Kualitas pelayanan publik yang belum merata;
- Ketimpangan sosial dan spasial antar wilayah;
- Persoalan tata lingkungan dan pengelolaan sampah;
- Rendahnya partisipasi dan literasi digital masyarakat dalam proses pembangunan;
- Krisis kepercayaan terhadap pemerintahan daerah pasca berbagai dinamika kelembagaan.

2.2.2.5. Telaahan KLHS Renstra Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2025-2029

Perumusan Isu Strategis di Kecamatan Coblong diawali dengan identifikasi isu berdasarkan beberapa sumber yang diantaranya:

- a) Isu kondisi lingkungan hidup di Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- b) Isu berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bandung;
- c) Isu berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Kota Bandung;
- d) Isu strategis Provinsi Jawa Barat berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045;
- e) Isu strategis Nasional berdasarkan dokumen KLHS RPJPN; serta
- f) Hasil pembahasan *focus group discussion* (FGD) ke-1 penyusunan Renstra Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Dari keenam sumber tersebut ditetapkan 7 isu rencana kerja strategis di Kecamatan Coblong Kota Bandung, yaitu:

1. Belum optimalnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat Kecamatan Coblong;

2. Belum optimalnya implementasi good governance dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan khususnya bidang pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Coblong;
3. Belum optimalnya penegakan ketentraman dalam tata kelola ruang publik
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum di wilayah Kecamatan Coblong;
5. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam pelayanan kesejahteraan sosial untuk masyarakat di Kecamatan Coblong;
6. Masih rendahnya tingkat daya saing UMKM di era digital;
7. Masih rendahnya minat daya tarik masyarakat dalam pemanfaatan Buruan Sae di Kecamatan Coblong;
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola permasalahan sampah di lingkungan.

Ketujuh isu rencana kerja strategis kemudian diselaraskan dengan isu strategis pada dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, menunjukkan adanya keselarasan sehingga Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029 dapat mendorong dalam pencapaian tujuan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Tabel 2.24 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Coblong

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu strategis Kota	Isu strategis Kecamatan Coblong
			Global	Nasional	Regional		
Jumlah penduduk yang cukup banyak dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi.	Kesenjangan Akses Layanan Dasar antar Wilayah dan Kelompok Masyarakat	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali	Perkembangan demografi global	Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata- rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.	Green dan blue economy	Bonus Demografi, Peningkatan Populasi Lansia, dan Transisi Demografi	Fasilitasi Penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Coblong
Terdapat pasar induk Caringin dan beberapa gudang logistik yang menjadi pusat kekuatan ekonomi	Pengetahuan pentingnya inovasi produk, pengemasan, dan sertifikasi produk	Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan Mitigasi yang memadai.	Geopolitik dan geoekonomi	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot density 5:10.000, bandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan (1.000:10.000).	Kualitas dan daya saing SDM	Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan UMKM di Kecamatan Coblong
Lahan Pemukiman & Kampung yang padat penduduk	Terjadinya banjir dan jalan yang sempit dalam pemukiman	Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.	Peningkatan urbanisasi dunia	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.	Keberlanjutan daya dukung Dan daya tampung lingkungan	Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan	Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kecamatan Coblong
							Fasilitasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Coblong
							Fasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan di Kecamatan Coblong

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu strategis Kota	Isu strategis Kecamatan Cobleng
			Global	Nasional	Regional		
Memiliki daya tarik dan potensi investasi yang sangat besar antara lain di bidang Perdagangan	Tingkat kesadaran kesehatan Pada Ibu Hamil dan pada anak usia remaja	Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Konstelasi perdagangan global	Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.	Keberlanjutan penataan ruang	Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia	Fasilitasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Cobleng
Merupakan Wilayah Perkotaan dengan kelengkapan fasilitas teknologi yang sangat memadai	Pengetahuan Masyarakat atas aturan dan peraturan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya penegakan hukum, implementasi good governance, dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam	Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong kantong kemiskinan tinggi.	Kualitas tata kelola pemerintahan	Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cobleng
							Fasilitas Penegakan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Cobleng

2.2.2.6. Isu Strategis Renstra Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2025-2029

Berdasarkan potensi daerah, permasalahan, serta isu lingkungan yang relevan pada berbagai tingkatan (global, nasional, regional, dan kota), Kecamatan Coblong menetapkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama pembangunan.

Pertama, isu peningkatan kualitas pelayanan publik muncul seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Hal ini sesuai dengan isu global tentang tata kelola pemerintahan dan isu kota terkait digitalisasi layanan publik. Oleh karena itu, strategi yang ditempuh Kecamatan Coblong adalah memperkuat kapasitas aparatur, memperluas digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan koordinasi antarwilayah.

Kedua, isu pengelolaan sampah. Masalah persampahan yang belum tertangani secara optimal serta keterbatasan lahan sebagai pusat lahan pengelolaan sampah menjadi tantangan. Isu ini terkait erat dengan isu global mengenai program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Ketiga, isu penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian penting mengingat jumlah penduduk yang cukup besar harus diimbangi dengan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Hal ini sejalan dengan isu global mengenai perkembangan demografi dan isu kota terkait bonus demografi serta transisi populasi. Dengan demikian, Kecamatan Coblong perlu merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang terarah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, Isu ketahanan pangan. Masalah penguatan ketahanan pangan belum tertangani secara optimal yang disebabkan keterbatasan lahan untuk mendukung program Buruan SAE. Isu ini terkait erat dengan isu global mengenai peningkatan urbanisasi dan isu kota mengenai kebijakan ekonomi hijau serta memperluas penerapan program ketahanan pangan.

Kelima, isu penyediaan infrastruktur dasar menjadi krusial, khususnya terkait pemeliharaan jalan dan penanganan banjir di kawasan permukiman padat. Hal ini mencerminkan isu regional mengenai keberlanjutan daya dukung lingkungan dan isu kota terkait tantangan polusi serta risiko degradasi lingkungan. Strategi Kecamatan Coblong diarahkan pada peningkatan kualitas sarana prasarana dasar untuk menunjang kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Keenam, isu percepatan pencegahan stunting juga menjadi prioritas. Kurangnya literasi parenting, rendahnya kesadaran pemeriksaan rutin, serta minimnya pendampingan dari dinas terkait, menunjukkan perlunya upaya sistematis. Hal ini sejalan dengan isu nasional tentang mismatch pendidikan dan keterampilan serta isu kota mengenai tantangan kesehatan. Strategi diarahkan pada peningkatan edukasi kesehatan masyarakat, pendampingan ibu hamil dan balita, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga kesehatan.

Ketujuh, isu penguatan dan pengembangan UMKM menjadi prioritas karena Coblong memiliki daya tarik ekonomi dengan lokasi strategis serta pusat perdagangan. Tantangan berupa rendahnya literasi inovasi produk dan sertifikasi masih harus diatasi. Hal ini berkaitan dengan isu nasional mengenai rendahnya pemanfaatan teknologi industri serta isu kota tentang dominasi ekonomi digital dan kreatif. Oleh sebab itu, fasilitasi pengembangan UMKM diarahkan pada peningkatan kapasitas, daya saing, dan pemanfaatan teknologi.

Kedelapan, isu penegakan keamanan dan ketertiban umum menjadi perhatian strategis bagi Kecamatan Coblong. Masih ditemukannya praktik premanisme, pelanggaran peraturan daerah, serta kurang optimalnya koordinasi dalam penanganan ketertiban masyarakat menuntut adanya langkah penanganan yang tegas, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan isu nasional mengenai tingginya kerentanan sosial akibat keterbatasan lapangan kerja dan isu kota yang menekankan pada implementasi kebijakan penegakan hukum, pengendalian kawasan, serta pengaturan aktivitas masyarakat di ruang publik.

Rencana strategis pembangunan di Kecamatan Coblong Kota Bandung pada periode tahun 2025-2029 memerhatikan berbagai aspek baik internal maupun eksternal wilayah. Berdasarkan telaahan pada potensi dan permasalahannya, maka dapat dirumuskan rencana strategis pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Coblong;
2. Fasilitasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Coblong;
3. Fasilitasi Penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Coblong;
4. Fasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan di Kecamatan Coblong;

5. Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kecamatan Coblong;
6. Fasilitasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Coblong;
7. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan UMKM di Kecamatan Coblong;
8. Fasilitas Penegakan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Coblong.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN ARAAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai visi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung.

Tujuan pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan Kecamatan Coblong menjadi landasan perumusan tujuan rencana strategis Kecamatan Coblong tahun. Berikut tujuan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1 Tujuan Kecamatan Coblong
Tahun 2025 – 2029

Tujuan RPJMD Kota Bandung	Tujuan Renstra Kecamatan Coblong	Indikator Tujuan Kecamatan Coblong
Penguatan Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Persentase ketercapaian RB General
Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Pembangunan Inklusif	Indeks Inovasi Daerah
Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Pembangunan Inklusif	Indeks Ketentraman

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya,

rumusan sasaran dari Kecamatan Coblong menjadi landasan perumusan indikator sasaran rencana strategis Kecamatan Coblong.

Keselarasan hubungan antara sasaran serta indikator Sasaran Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

**Tabel 3.2 Sasaran Kecamatan Coblong
Tahun 2025 – 2029**

Sasaran Kota Bandung	Sasaran Kecamatan Coblong	Indikator Sasaran Kecamatan Coblong
Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Coblong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong
Meningkatnya pembangunan inklusif	Meningkatkan sarana dan prasaranan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat (PRAKARSA)	Persentase Kelurahan UTAMA
Meningkatnya pembangunan inklusif	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum	Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti

Indikator-indikator diatas digunakan sebagai rujukan dalam proses evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Coblong. Dengan menetapkan outcome yang jelas dan terukur, Kecamatan Coblong diharapkan dapat mengarahkan pembangunan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata bagi warga masyarakat.

Untuk menjamin konsistensi arah dan substansi perencanaan, tujuan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025–2029 disusun dengan memastikan keterkaitan dan penyelarasan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan tingkat daerah. Tabel berikut merangkum keterkaitan Tujuan Renstra Kecamatan Coblong dengan SDGs, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Kota Bandung Tahun 2025–2045, serta strategi menjaga keselarasannya secara tematik dan substansial.

3.3. Analisis Lingkungan Strategis (Analisis SWOT);

Nilai-nilai tersebut dalam mewujudkannya memerlukan kemampuan segenap aparat Pemerintah Kecamatan Coblong mengenali dan memahami potensi internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan hambatan). Kemampuan dalam mensinergis potensi internal dan faktor eksternal, diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan Coblong, dan modal untuk tumbuh kembangnya kehidupan harmonis yang saling menghargai.

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Coblong dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Coblong berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Faktor internal berupa kekuatan/potensi (strengths) dan kelemahan-kelemahan (weaknesses) penting untuk dipahami seberapa besar kekuatan/potensi organisasi yang dapat dimanfaatkan dan seberapa banyak kelemahan-kelemahan organisasi harus diatasi.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari lingkungan luar organisasi tetapi dapat memberikan pengaruh kuat terhadap kinerja organisasi adalah berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang mungkin timbul pada masa yang akan datang.

1. Analisis Lingkungan Internal :

STRENGTH (Kekuatan/Potensi) meliputi :

Adanya Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai dasar hukum kedudukan dan keberadaan Kecamatan Coblong.

- a. Adanya Perda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 ; sebagai dasar orientasi pengembangan kebijakan dan program Kecamatan Coblong.
- b. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandung untuk dijalankan di Kecamatan Coblong melalui Keputusan Walikota Nomor 870 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Wilayah kerja dan lokasi kantor Kecamatan Coblong cukup strategis, terletak di pusat Kota Bandung dan berada dikawasan perekonomian yang maju.

WEAKNESSES (Kelemahan) meliputi :

- a. Kuantitas dan Kualitas teknis SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Coblong belum memadai.
- b. Sarana dan prasarana Kecamatan Coblong kurang memadai.
- c. Keterbatasan anggaran yang dikelola Kecamatan Coblong.
- d. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal.

2. Analisis Lingkungan Eksternal :

OPPORTUNITIES (Peluang) meliputi :

- a. Terdapat perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia.
- b. Terdapat sentra jasa perdagangan dan perkantoran (pemerintah dan BUMN/swasta) di Kota Bandung.
- c. Terdapat bangunan/perumahan dengan arsitektur artistik dan bersejarah.
- d. Dilalui jalan utama yang menjadi pusat wisata belanja di Kota Bandung.
- e. Masyarakat relatif sudah maju dan memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi.
- f. Tersedia sarana dan prasarana lingkungan yang relatif memadai.

THREATS (Hambatan/Ancaman) meliputi :

- a. Kepadatan penduduk tinggi.
- b. Dinamika sosial yang cepat yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.
- c. Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan.
- d. Tingkat penduduk komuter dan musiman yang cukup tinggi.
- e. Cukup tinggi keluarga pra sejahtera dan pengangguran, akibat urbanisasi.
- f. Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman belum tertata dengan baik.
- g. Keindahan dan kerapihan sarana dan prasarana umum belum tertata.
- h. Keberadaan PKL yang sulit dikendalikan.

Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGHTS)	PELUANG (OPPORTUNITIES)
• Adanya Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai dasar hukum kedudukan dan keberadaan Kecamatan Coblong. • Adanya Perda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 ; sebagai dasar orientasi	• Terdapat perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia. sentra jasa perdagangan dan perkantoran (pemerintah dan BUMN/swasta) di Kota Bandung • Terdapat bangunan/perumahan dengan arsitektur artistik dan bersejarah. • Dilalui jalan utama yang menjadi pusat wisata belanja di Kota Bandung.

pengembangan kebijakan dan program Kecamatan Coblong. • Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandung untuk dijalankan di Kecamatan Coblong melalui Keputusan Walikota Nomor 870 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. • Wilayah kerja dan lokasi kantor Kecamatan Coblong cukup strategis, terletak di pusat Kota Bandung dan berada dikawasan perekonomian yang maju.	• Masyarakat relatif sudah maju dan memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi. • Tersedia sarana dan prasarana lingkungan yang relatif memadai.
---	--

KELEMAHAN (WEAKNESS)	TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)
• Kuantitas dan Kualitas teknis SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Coblong belum memadai. • Sarana dan prasarana Kecamatan Coblong kurang memadai. • Keterbatasan anggaran yang dikelola Kecamatan Coblong. • Penyelenggaraan pelayanan belum optimal.	• Dinamika sosial yang cepat yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. • Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan. • Tingkat penduduk komuter dan musiman yang cukup tinggi.Cukup tinggi keluarga pra sejahtera dan pengangguran, akibat urbanisasi. • Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman belum tertata dengan baik. • Keindahan dan kerapihan • sarana dan prasarana umum belum tertata. • Keberadaan PKL yang sulit dikendalikan.

Matrik SWOT

3.4. Strategi Kecamatan Coblong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Coblong tahun 2025-2029

Dalam pengukuran pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025 – 2029, maka dibuat sebuah penilaian keberhasilan yang menjadi target pada setiap tahunnya dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis, Sebagai Berikut:

Tabel 3.3 Keterkaitan Sasaran Renstra Kecamatan Coblong

Tujuan Renstra Kecamatan Coblong 2025-2029	Keterkaitan dengan SDGs	Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029	Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029	Strategi Menjaga Keselarasan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	SDG 16 (Institusi yang Kuat)	Tata Kelola Pemerintahan Digital dan Demokrasi Partisipatif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif	Digitalisasi tata kelola (SPBE), sistem reward-punishment ASN dan Informasi keterbukaan layanan publik.
Meningkatkan sarana dan prasarana kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat (PRAKARSA)	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) SDG 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera) SDG 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur) SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan) SDG 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan)	Pemerataan Pembangunan Daerah dan Penguatan Ketahanan Sosial	Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	Penguatan partisipasi peran masyarakat dan Lembaga dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan fasilitas umum sebagai simbol kesetaraan infrastruktur
Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum	SDG 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan) SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh)	Pemerataan Pembangunan Daerah dan Penguatan kelembagaan	Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	Penguatan partisipasi peran masyarakat dan Lembaga dalam menjaga gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Tabel ini mencerminkan bagaimana arah kebijakan dan sasaran pembangunan di Kecamatan Coblong telah dirancang untuk saling melengkapi dan saling menguatkan dalam sistem perencanaan pembangunan Kota dan Nasional.

**Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Coblong
Tahun 2025 – 2029**

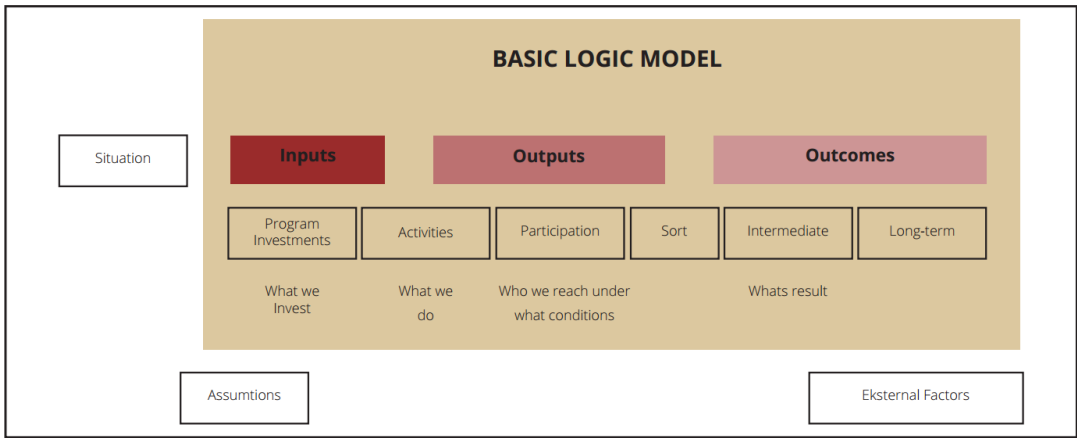
NO	NSPK SASARAN RENSTRA YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	97,50	97,51	97,52	97,53	97,54	97,55	
2	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Meningkatnya Pembangunan Inklusif	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Kelurahan UTAMA	-	25	50	75	100	100	
3	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Pembangunan Inklusif	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum	Persentase Satlinmas Aktif	85	86	100	100	100	100	

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat dan format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. *Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

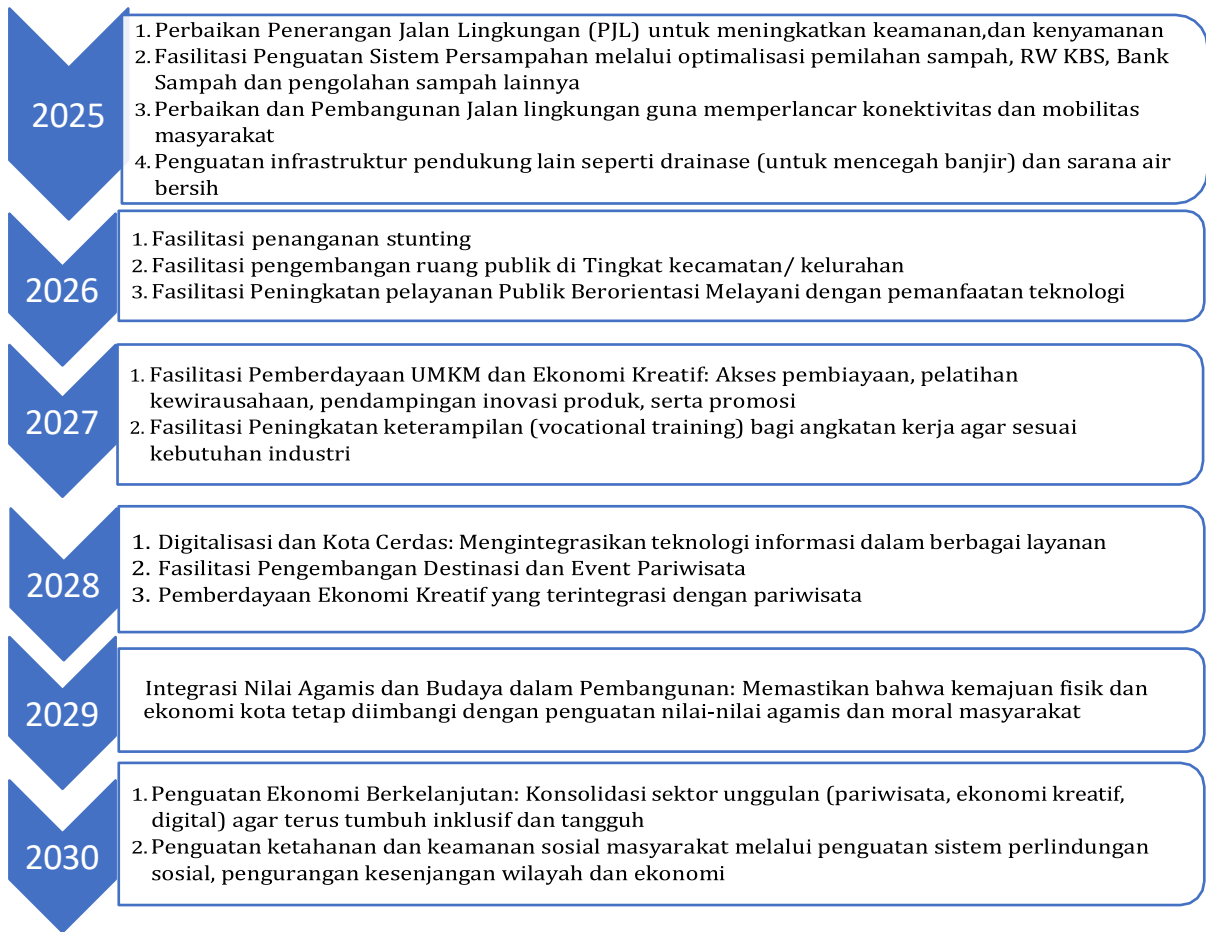
Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Logic Model

Rencana strategi pembangunan Kecamatan Coblong akan diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Pengerahan seluruh sumber daya secara kolaboratif dan sinergi akan dilakukan di setiap tahapan pembangunan. Adapun penahapan rencana strategis di Kecamatan Coblong yang menjadi fokus pembangunan tahunan, disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 3.2 Penahapan Pembangunan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025 - 2029



3.5. Arah Kebijakan Kecamatan Coblong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Coblong tahun 2025-2029

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, makadibutuhkan Strategi Renstra Kecamatan Antapani Tahun 2025-2029 yaiturencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokusdan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkunganyang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Strategi disusun secara bertahap atau disebut 7penahapanpembangunan yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Berikut ini adalah penahapan pembangunan jangka menengah yang menjadi fokuspembangunan tahunan dalam RPJMD yang menjadi dasar Penahapan Renstra Kecamatan Conlong disajikan pada tabel di bawah ini:.

Tabel 3.5. Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2030

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
TEMA PENGEMBANGAN	FOKUS	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Fondasi Pembangunan Kota	Penguatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Peningkatan Produktivitas, Daya Saing Ekonomi, dan Iklim Investasi	Penguatan Ekosistem Inovasi dan Pariwisata	Pemantapan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis	Konsolidasi Visi dan Integrasi Pembangunan Kota Bandung Berkelanjutan
		Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dasar, terutama perbaikan penerangan jalan, sistem persampahan, dan infrastruktur jalan sebagai fondasi layanan kota, melalui: • Perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh kota untuk meningkatkan keamanan, dan kenyamanan • Penguatan Sistem Persampahan melalui penambahan armada pengangkut, pembangunan/rehab fasilitas TPA/TPST, program daur ulang, dan edukasi Masyarakat. • Perbaikan dan Pembangunan Jalan guna memperbaiki konektivitas dan mobilitas • Penguatan infrastruktur pendukung lain seperti drainase (untuk mencegah banjir) dan sarana air bersih, agar layanan dasar perkotaan semakin unggul.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan fasilitas olahraga untuk mendukung pengembangan SDM yang unggul, melalui: • Peningkatan Layanan Kesehatan: Rehabilitasi puskesmas dan rumah sakit daerah, penyediaan tenaga medis, serta program kesehatan preventif (vaksinasi, posyandu, penanganan stunting) • Peningkatan Layanan Pendidikan: Pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana sekolah, dan peningkatan kompetensi guru • Pengembangan Fasilitas Olahraga dan ruang publik di Tingkat kecamatan/ kelurahan. • Penataan sistem transportasi atau konektivitas pendukung mobilitas Masyarakat • Peningkatan pelayanan Publik Berorientasi Melayani dengan pemanfaatan teknologi	Penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, peningkatan produktivitas ekonomi kota, serta perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui: • Penguatan Iklim Investasi: Simplifikasi perizinan serta pemberian insentif investasi sektor prioritas (pariwisata, ekonomi kreatif, manufaktur ringan) • Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif: Akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan inovasi produk, serta promosi • Peningkatan keterampilan (vocational training) bagi angkatan kerja agar sesuai kebutuhan industri • Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Tata Kelola Ekonomi: perencanaan based on data, pengendalian inflasi dan harga bahan pokok, serta optimalisasi asset daerah	Pengembangan ekosistem inovasi dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata serta ekonomi kreatif, melalui: • Pembangunan Pusat Inovasi dan Riset: Pengembangan technopark, inkubator bisnis, dan pusat kreativitas di Bandung • Digitalisasi dan Kota Cerdas: Mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai layanan • Pengembangan Destinasi dan Event Pariwisata: Penataan dan peningkatan kualitas destinasi wisata unggulan, serta penyelenggaraan event budaya dan kreatif bertaraf nasional/ internasional secara rutin • Pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata • Penguatan jejaring Kerjasama internasional, memperluas sister city di bidang inovasi dan pariwisata	Konsolidasi capaian pembangunan sebelumnya dan memantapkan daya saing serta keberlanjutan pembangunan kota, melalui: • Penguatan Rantai Pasok dan Kemitraan Usaha: Channeling pelaku usaha kecil dengan industri (BUMN/Korporasi) • Pemantapan Daya Saing Ekonomi Daerah: Mengukuhkan pencapaian di sektor ekonomi dan investasi agar berkelanjutan. Industri unggulan kota (jasa kreatif, pariwisata, perdagangan) akan difasilitasi agar naik kelas dan mampu bersaing secara nasional maupun global. • Integrasi Nilai Agamis dan Budaya dalam Pembangunan: Memastikan bahwa kemajuan fsk dan ekonomi kota tetap diimbangi dengan penguatan nilai-nilai agamis dan moral masyarakat.	Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Sosial Menuju Pembangunan Kota Bandung Berkelanjutan, melalui: • Perkuatan Ekonomi Berkelanjutan: Konsolidasi sektor unggulan (pariwisata, ekonomi kreatif, digital) agar terus tumbuh inklusif dan tangguh • Perkuatan ketahanan dan keamanan sosial masyarakat melalui penguatan sistem perlindungan sosial, pengurangan kesenjangan wilayah dan ekonomi. • Perkuatan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, budaya lokal, dan etika sebagai pilar integrasi sosial Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis. • Perkuatan kelembagaan dan perencanaan berbasis data untuk memastikan kesinambungan pembangunan kota

Tabel 3.6. Penahapan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Fondasi & Konsolidasi Data	Percepatan Infrastruktur & Pemberdayaan	Penguatan Ekonomi Lokal & Layanan Publik	Inovasi & Kolaborasi	Konsolidasi & Keberlanjutan
- Penyusunan data mikro (Kemiskinan, Stunting, UMKM, Infrastruktur dasar) - Pemetaan masalah prioritas per RW pada setiap Kelurahan - Penguatan pelayanan publik berbasis digital. - Percepatan program kebersihan & RW KBS (Kawasan Bebas Sampah) - Koordinasi Pelatihan UMKM (produksi & pemasaran) dengan Dinas terkait	- Perbaiki jalan lingkungan, drainase, PJI dan PJG serta infrastruktur dasar lainnya - Pembangunan dan Aktivasi sarana RW Buruan SAE (Ketahanan Pangan) - Penguatan bank sampah & pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung “Rumah Memilah” - Perbaiki Fasilitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan - Koordinasi Pelatihan kader PKK, karang taruna, LPM dengan Dinas terkait	- Pengembangan UMKM (kuliner, jasa, kerajinan) dengan Koordinasi akses pelatihan lanjutan dan bantuan modal dari Dinas terkait - Integrasi Bank Sampah RW dengan Buruan SAE sebagai upaya <i>zero waste</i> - Peningkatan layanan kesehatan & percepatan penurunan stunting melalui Koordinasi dengan Dinas terkait dan Fasilitasi Posyandu tingkat RW. - Pengembangan ruang publik & ruang terbuka hijau dan Revitalisasi sarana olahraga & pertemuan warga	- Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi - Kolaborasi dengan CSR, Satuan Pendidikan, perguruan tinggi & swasta dalam rangka pengelolaan sampah, penanganan stunting, dan UMKM. - Kolaborasi RW KBS menuju “Antapani 100% Rumah Memilah” dengan Penguatan kelembagaan masyarakat (LPM, PKK, Karang Taruna)	- Evaluasi capaian pembangunan lima tahun - Pengembangan ekonomi kreatif & digital - Konsolidasi dengan Dinas terkait dan Persiapan penahapan pembangunan 2030–2034

Selanjutnya menentukan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan AntapaniTahun 2025-2029 yaitu rangkaian yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Antapani dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Antapani Tahun 2025-2029.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya diuraikan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah kebijakan Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Coblong.
2. Kebijakan meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Cobloong
- Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan

tercapainya visi dan misi Wali Kota Bandung untuk di Kecamatan Coblong dapat dilihat di tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Coblong
Tahun 2025-2029**

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	MISI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	KET
1	- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) wajib melakukan survei kepuasan masyarakat minimal sekali setahun - Hasil survei dipakai sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik. - Survei ini mencakup sembilan unsur pelayanan: persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana & prasarana, dan penanganan pengaduan	Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	Meningkatkan sarana dan prasaranan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat (PRAKARSA)	Fasilitasi penuntasan kemiskinan	
				Fasilitasi Perwujudan sumber daya manusia yang terampil, memiliki keahlian, dan produktif	
				Fasilitasi Pemenuhan bantuan sosial secara tepat sasaran	
				Fasilitasi Pemantapan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	
				Fasilitasi Pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi.	
				Fasilitasi Pemerataan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	
				Perwujudan kota yang aman dan tertib	
				Fasilitasi Pemerataan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
				Fasilitasi pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	
2	- Kelurahan mendapat alokasi anggaran (DAU / APBD) untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan kegiatan pemberdayaan masyarakat - Pembentukan satuan pelindung masyarakat (Linmas) di kelurahan berdasarkan aturan teknis dan keputusan Camat dan Lurah	Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum	Penguatan Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	
				Peningkatan Pengawasan dan Patroli Wilayah	
				Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	
				Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Publik	
				Penguatan Koordinasi Antar Instansi	
				Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana	
3	- Camat/Lurah melalui Satlinmas membantu di tingkat kelurahan/desa.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Penerapan peraturan daerah demi mendukung Visi dan Misi serta tujuan Pemerintah kota Bandung	
				Fasilitasi Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan	

	- Pembentukan satuan pelindung masyarakat (Linmas) di kelurahan berdasarkan aturan teknis dan keputusan Camat dan Lurah - Pemerintah Kota Bandung melakukan penindakan melalui Satpol PP dan proses sidang tipiring untuk pelanggaran tertentu			pembangunan.	
				Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima	
				Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	
				Perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.	
				Perwujudan e-government dan smart city	
				Usulan pemantapan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	
				Perwujudan pemda yang akuntabel dan berorientasi hasil dalam mencapai sasaran prioritas daerah dan nasional.	
				Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering*, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Coblong pada periode 2025-2029. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran kinerja Kecamatan Coblong periode tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Coblong
Tahun 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS RENSTRA / IKU	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah dan Meningkatkan Ketentraman Daerah		Indeks Inovasi Daerah			
		Indeks Ketentraman			
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			
		Persentase Kelurahan UTAMA			
			Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			<i>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik</i>	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan</i>	<i>Persentase Kelurahan yang Memenuhi Data Profil Kelurahan di Bidang Pemerintahan</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>
				<i>Persentase Pemenuhan Data Profil Kelurahan di Bidang Pemerintahan</i>	
			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			<i>Terselenggaranya Pelayanan Kependudukan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan tepat waktu sesuai SOP</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>
			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

			<i>Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum di Lingkungan Kecamatan</i>	<i>Persentase Kelurahan yang Memenuhi Data Profil Kelurahan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i> <i>Persentase Pemenuhan Data Profil Kelurahan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			<i>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Persentase Kelurahan yang Memenuhi Data Profil Kelurahan di Bidang Kesejahteraan Sosial</i> <i>Persentase Pemenuhan Data Profil Kelurahan di Bidang Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>
			Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Bidang Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang Menunjang Kelurahan Berdaya</i>	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>
			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Saranadan Prasarana Kelurahan
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			<i>Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan</i>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
			Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif Persentase Satkamling Aktif	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMANDAN KETERTIBAN
			<i>Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan</i>	<i>Persentase Satlinmas yang Terbina</i>	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2025-2030 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/O UTPUT	INDOKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
BIDANG KECAMATAN															
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	%	100	100%	21.132.925.286	100%	20.736.765.499	100%	21.107.564.815	100%	21.487.285.146	100%	21.876.241.349	100%	22.256.171.586
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Coblong	Nilai	A	87.10		87.10		87.10		87.10		87.10			
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	57.030.000	100	52.000.000	100	62.000.000	100	63.000.000	100	65.000.000	100	67.000.000
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	57.030.000	1	52.000.000	1	62.000.000	1	63.000.000	1	65.000.000	1	67.000.000
,															
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	12.516.621.072	100	13.309.501.632	100	13.438.577.675	100	13.748.298.006	100	13.999.660.410	100	14.251.185.394
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tunjangan ASN	Orang	49	49	12.516.621.072	51	13.309.501.632	51	13.438.577.675	51	13.748.298.006	51	13.999.660.410	51	14.251.185.394
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	4	4	186.028.297	4	215.771.922	4	225.771.922	4	225.771.922	4	225.771.922	4	225.771.922
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Paket	49	49	35.256.375	51	65.000.000	51	65.000.000	51	65.000.000	51	65.000.000	51	65.000.000

7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	49	49	150.771.922	51	150.771.922	51	160.771.922	51	160.771.922	51	160.771.922	51	160.771.922
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	1.594.496.309	100	1.212.467.184	100	1.314.190.458	100	1.373.190.458	100	1.434.784.257	100	1.455.189.509
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	66.142.693	1	52.559.468	1	62.559.468	1	62.559.468	1	72.559.468	1	72.559.468
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	2	285.985.658	2	204.360.642	2	214.360.642	2	214.360.642	2	214.360.642	2	214.360.642
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	3	3	130.529.755	3	105.759.922	3	115.759.922	3	115.759.922	3	115.759.922	3	115.759.922
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	838.800.490	12	556.095.780	12	594.819.054	12	653.819.054	12	683.819.054	12	693.819.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	206.650.100	12	105.032.578	12	115.032.578	12	115.032.578	12	125.032.578	12	125.032.578
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12	18.861.613	12	35.886.872	12	38.886.872	12	38.886.872	12	40.480.694	12	50.886.000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3	47.526.000	3	152.771.922	3	172.771.922	3	172.771.922	3	182.771.900	3	182.771.900
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1.348.824.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan	1	1	878.960.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Laporan	1	1	324.457.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Laporan	1	1	145.406.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	4.018.783.024	100	4.245.489.660	100	4.265.489.660	100	4.275.489.660	100	4.349.489.660	100	4.455.489.660

7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	283.185.100	12	386.345.100	12	406.345.100	12	406.345.100	12	450.345.100	12	456.345.100
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	3.735.597.924	12	3.859.144.560	12	3.859.144.560	12	3.869.144.560	12	3.899.144.560	12	3.999.144.560
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasana Pelayanan Publik	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persen	100	100	1.411.141.775	100	1.701.535.100	100	1.801.535.100	100	1.801.535.100	100	1.801.535.100	100	1.801.535.100
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	61	61	677.571.200	61	1.507.640.200	61	1.607.640.200	61	1.607.640.200	61	1.607.640.200	61	1.607.640.200
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	50	50	105.094.800	50	193.894.900	50	193.894.900	50	193.894.900	50	193.894.900	50	193.894.900
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	7	7	628.475.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	100	8.218.905.241	100	8.671.738.299	100	8.826.799.832	100	8.985.591.970	100	9.148.246.383	100	9.307.126.300
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persentase RT RW yang laporannya lengkap	Persen	100	100	3.774.152.500	100	3.975.541.990	100	4.095.541.990	100	4.095.541.990	100	4.195.541.990	100	4.205.541.990
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	4	3.774.152.500	4	3.975.541.990	4	4.095.541.990	4	4.095.541.990	4	4.195.541.990	4	4.205.541.990
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
Terselenggaranya Pelayanan Kependudukan di tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan tepat waktu sesuai SOP	Persen	100	100	53.241.708	100	120.482.339	100	125.482.339	100	184.274.477	100	194.274.477	100	204.274.477
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	53.241.708	4	120.482.339	4	125.482.339	4	184.274.477	4	194.274.477	4	204.274.477
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															

Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum di Lingkungan Kecamatan Prasarana Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik terpelihara	Persen	100	100	3.328.973.716	100	2.243.413.128	100	2.253.474.660	100	2.353.474.660	100	2.393.474.660	100	2.482.354.578
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12	12	3.328.973.716	12	2.243.413.128	12	2.253.474.660	12	2.353.474.660	12	2.393.474.660	12	2.482.354.578
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat															
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang Kesejahteraan Sosial	Laporan	4	12	1.062.537.317	12	2.332.300.842	12	2.352.300.843	12	2.352.300.843	12	2.364.955.256	12	2.414.955.255
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	12	1.062.537.317	12	2.332.300.842	12	2.352.300.843	12	2.352.300.843	12	2.364.955.256	12	2.414.955.255
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan															
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	-	100	7.132.684.546	100	6.409.545.700	100	6.524.156.397	100	6.641.524.500	100	6.761.747.326	100	6.879.180.309
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang menunjang kelurahan UTAMA	Kegiatan	12	12	6.563.224.478	12	6.029.847.790	12	6.107.847.790	12,00	6.207.847.790	12	6.277.347.790	12	6.307.347.790
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah	Unit	12	12	3.324.868.136	30	4.274.374.556	35	4.302.374.556	42	4.352.374.556	45	4.382.374.556	46	4.402.374.556
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	4	4	3.238.356.342	4	1.755.473.233	4	1.805.473.233	4	1.855.473.233	4	1.894.973.233	4	1.904.973.233
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan															
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina	Persen	100	100	569.460.068	100	379.697.910	100	416.308.608	100	433.676.710	100	484.399.537	100	571.832.519
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	364.738.380	4	271.129.110	4	297.739.808	4	313.107.910	4	363.830.737	4	401.263.719
7.01.03.2.03.04 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	1	204.721.688	1	108.568.800	1	118.568.800	1	120.568.800	1	120.568.800	1	170.568.800
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	100	100	1.968.264.872	100	1.885.160.500	100	1.918.869.529	100	1.953.389.559	100	1.988.749.214	100	2.023.288.326
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas yang terbina	Persen	100	100	1.968.264.872	100	1.885.160.500	100	1.918.869.529	100	1.953.389.559	100	1.988.749.214	100	2.023.288.326
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	1.968.264.872	12	1.885.160.500	12	1.918.869.529	12	1.953.389.559	12	1.988.749.214	12	2.023.288.326
					38.452.779.944		37.703.209.997		38.377.390.573		39.067.791.174		39.774.984.271		40.465.766.520

Terdapat beberapa Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS KECAMATAN COBLONG	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA AKSI	KET.
1	PRAKARSA Bandung UTAMA	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Penanganan Sampah/Percepatan Pencapaian RW Kawasan Bebas Sampah (KBS); 2. Ketahanan Pangan (RW Buruan Sae); 3. Penanganan Kemiskinan; 4. Penyediaan Infrastruktur Dasar; 5. Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting; 6. Penguatan dan Pengembangan UMKM	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan		
				7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
				7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		Terjaganya kondusivitas daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Penguatan Siskamling Aktif 2. Penguatan Linmas dan Satpol PP Kota Bandung (Kajian Insentif dan Keterlibatan dalam Penataan Kota) 3. Meningkatkan Peran Linmas dan Gober untuk Mitigasi Kebencanaan 4. Membangun Budaya Ketangguhan dan Tanggap Bencana (Resilience Culture)	
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
				7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Coblong

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Coblong Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Coblong Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Coblong untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Coblong Kota Bandung yaitu:

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Coblong
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 2. Persentase Kelurahan UTAMA 3. Persentase Satlinmas Aktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Coblong Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
Coblong Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran 2025 – 2029**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6					7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Coblong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan Pemenuhan standar kepatuhan pelayanan public sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Alat ukur yang digunakan sesuai dengan Permenpan RB No. 14 tahun 2017.	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	97,50	97,51	97,52	97,53	97,54	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Coblong

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Coblong	Persentase Kelurahan UTAMA	Kelurahan disebut sebagai Kelurahan UTAMA jika memenuhi minimal 6 dari 7 kriteria berikut: 1. Pemutakhiran data profil RW (Laci RW) 2. Partisipasi Kewilayahan dalam Infrastruktur Dasar Terpelihara (memenuhi 4 dari 6 kriteria) a. Perbaikan jalan di lingkungan masyarakat sebesar minimal 10% dari total panjang jalan rusak (dalam meter); b. Perbaikan saluran air (drainase) di lingkungan masyarakat sebesar minimal 10% dari total drainase rusak; c. Pemenuhan ODF 100%; d. Tersedianya/terbangunnya biopori/drumpori minimal sebanyak 20 titik per RW; e. Tersedianya PjL/PjG pada titik rawan	Jumlah Kelurahan UTAMA dibagi jumlah semua Kelurahan yang ada di Kecamatan dikali 100%	-	50	75	75	100	%	Semakin banyak Kelurahan yang memenuhi Kelurahan UTAMA, menunjukkan semakin baik Pembangunan sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Coblong

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
			(berkurangnya titik rawan) f. Fasilitasi pembuatan sarana air bersih 3. Partisipasi Kewilayahan dalam Pemenuhan Kelurahan Memilah (memenuhi 3 dari 5 dengan kriteria a dan e menjadi kriteria wajib) a. Terbentuknya RW pemilah sampah (minimal sebesar 50% jumlah rumah setiap RW pada Kelurahan); b. Terdapat pengolahan sampah organik yang aktif (misalnya loseda, kang empos, bata terawang, dll) pada setiap RW; c. Adanya pengolahan sampah (yang aktif) melalui pemanfaatan budidaya magot/ikan lele/ayam pada tingkat Kelurahan; d. Terdapat pengolahan sampah melalui bank sampah yang aktif (skala kelurahan). e. Terdapat buruan sae RW yang aktif (minimal 50% dari jumlah RW tiap Kelurahan)								

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
			4. Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Stunting (4 dari 5 kriteria) a. Adanya program khusus (inovasi kewilayahan) pendorong pencegahan Stunting ; b. Terfasilitasinya makanan tambahan untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis) atau yang rentan menjadi Ibu Hamil KEK; c. Terfasilitasinya makanan tambahan untuk Balita Stunting; d. Terfasilitasinya Posyandu (PMT penyuluhan, Insentif Kader Posyandu, pengadaan peralatan Posyandu); e. Tersedianya laporan TPPS Kelurahan secara berkala: • Adanya SK TPPS Kelurahan; • Monitoring dan Evaluasi TPPS Kelurahan; • Rembug Stunting tingkat Kelurahan; • Terkumpulnya data sasaran, capaian layanan dan data pendukung berbasiskan kelurahan.								

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
			5. Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Kemiskinan a. Terlaksananya pemutakhiran data sosial ekonomi warga sesuai dengan indikator-indikator pada DTSEN; b. Terlaksananya pengajuan usulan kelayakan kepesertaan DTSEN melalui Musyawarah Kelurahan setiap triwulan; c. Tersedianya peta kantong kemiskinan yang menunjukkan sebaran warga miskin sampai tingkat RW berdasarkan data DTSEN; d. Terfasilitasinya bantuan kepada Warga Miskin yang terdata di DTSEN namun tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat/Daerah; e. Terlaksananya penguatan potensi dan kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan monitoring, penanganan, dan tindak lanjut aduan sosial masyarakat. f. Fasilitasi pendataan dan pelatihan bagi								

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
			pengangguran di lingkup RW; g. Fasilitasi pelatihan bagi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) 6. Partisipasi Kewilayahan dalam Pengembangan UMKM a. Pendataan UMKM dan UMKM Perempuan tingkat RW b. Fasilitasi NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal 7. Partisipasi Kewilayahan dalam Kesiapsiagaan Bencana a. Fasilitasi pembentukan RW Siaga Bencana b. Fasilitasi Mitigasi dan Penanganan Bencana								

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Coblong	Persentase Satlinmas Aktif	Satlinmas aktif Kriteria Satlinmas Aktif adalah secara kumulatif memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas; 2. Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas; 3. Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas; 4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas; 5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas; 6. Laporan Tahunan Satlinmas; 7. Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria: - Kepengurusan/Kelembagaan - Jadwal piket/ronda - Daftar Hadir - Buku Laporan Kejadian	Jumlah yang memenuhi kriteria Satlinmas Aktif dibagi jumlah semua Kelurahan yang ada di Kecamatan dikali 100% (Laporan Satlinmas Aktif diharuskan memenuhi semua kriteria)	100	100	100	100	100	%	Semakin banyak Kelurahan yang memenuhi Kriteria Satlinmas aktif, menunjukkan semakin baik kondisi keamanan dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Coblong

V. PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari isu-isu strategis yang ada di Rencana Pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Coblong periode Tahun 2025-2029. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Coblong harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029.
2. Rencana Kerja Kecamatan Coblong ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kecamatan Coblong dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Coblong harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Coblong Tahun 2025-2029.
4. RENSTRA Kecamatan Coblong akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses

perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Coblong Kota Bandung tahun 2025-2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Coblong.

Bandung, 13 November 2025

CAMAT COBLONG



KRINDA HAMIDIPRADIA, SH.,M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19680317 199603 1 005